



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# 2024

## LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGOLAHAN

# Kata Pengantar

**P**uji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Direktorat Pengolahan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP ada dua yaitu, Volume Produk Olahan (VPO) dengan capaian sebesar 7,7 juta ton (prognosa), atau setara dengan 102,7% dari target tahun 2024 sebesar 7,5 juta ton dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) dengan capaian sebesar 104,94%, atau setara dengan 100,2% dari target tahun 2024 sebesar 104,75%. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 102,99% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: [direktoratpbm@gmail.com](mailto:direktoratpbm@gmail.com). Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2025  
Direktur Pengolahan



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

# Tim Penyusun

## **PENGARAH**

Direktur Pengolahan

## **PENYUSUN**

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan

## **KONTRIBUTOR**

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan,  
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan IV Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan selama Triwulan IV Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pengolahan melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 11 (sebelas) **Sasaran Kegiatan (SK)** sebagai berikut: (1) Utilitas UPI yang meningkat; (2) Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan; (3) Terlaksananya sertifikasi produk KP; (4) Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP; (5) Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk KP; (6) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (7) Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan; (8) Tersedianya prasarana system rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan (9) Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan; (10) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan; (11) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 11 IKK bersifat tahunan, 10 IKK bersifat triwulan, 1 IKK bersifat semesteran, dan 2 IKK bersifat bulanan.

**Indikator Kinerja Kegiatan** yang bersifat tahunan yaitu Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan (produk), Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses* dan *Utilitas*) (data), Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dibangun (unit), Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (orang), Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk

pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Nilai penilaian mandiri sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di lingkungan Direktorat Pengolahan, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan, Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan, Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan (%), Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan. Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Utilitas UPI yang Meningkat (%), Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk), Pabrik Es yang Dibangun (Unit), *Chest freezer* yang Disediakan (Unit), Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit), Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit), Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit), UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina (industri), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Indikator yang bersifat bulanan yaitu Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM), Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dua puluh empat (24) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan IV adalah sebesar 102,99 (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetnya pada Triwulan IV. Adapun rincian capaian periode Triwulan IV yaitu sebagai berikut :

- IKK Perhitungan Utilitas UPI (%); target 68%; capaian 68,26% atau 100,38% dari target.
- IKK Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk); target 12; capaian 15 atau 120,00% dari target.

- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk); target 10.000; capaian 10.000 atau 100,00% dari target.
- IKK Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data); target 3; capaian 3 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit); target 1; capaian 1 atau 100,00% dari target.
- IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang); target 38.159; capaian 38.159 atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%); target 0,25%; capaian 0,26% atau 104,00% dari target.
- IKK Pabrik Es *Portable* Yang Dibangun (Unit); target 10; capaian 10 atau 100,00% dari target.
- IKK *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit); target 311; capaian 311 atau 100,00% dari target.
- IKK Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit); target 165; capaian 165 atau 100,00% dari target.
- IKK Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit); target 9; capaian 9 atau 100,00% dari target.
- IKK Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang Disediakan (Unit); target 8; capaian 8 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 1.800; capaian 1.800 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 875; capaian 875 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri); target 80; capaian 80 atau 100,00%.
- IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai); target 75; capaian 84,03 atau 112,04% dari target.

- IKK Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks); target 87; capaian 88,10 atau sebesar 101,26% dari target.
- IKK Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai); target 84; capaian 84 atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (%); target 100%, capaian 100% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 80; capaian 89,47 atau sebesar 111,84%.
- IKK Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi); target 1; capaian 1 atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar; target 94; capaian 133,33% atau 120,00 dari target%.
- IKK Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan (%); target 95; capaian 99,87 atau 105,13% dari target.
- IKK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%); target 80; capaian 84,07 atau 105,09% dari target.

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.9.178.309.000,- dari pagu semula Rp 69.198.100.000,- menjadi Rp 59.811.206.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 59.733.392.857,- atau setara dengan 99,87% dari pagu setelah AA. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Triwulan IV Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2024 dan analisis yang

komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan IV Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Tim Penyusun.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1.Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2.Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3.Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>2</b>
<b>1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia.....</b>	<b>3</b>
<b>1.5. Permasalahan Utama.....</b>	<b>4</b>
<b>1.6. Sistematika Penyajian.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>7</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Rencana Strategis.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>11</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan.....</b>	<b>11</b>
<b>3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....</b>	<b>15</b>
<b>Kegiatan 1. Utilitas UPI Yang Meningkatkan.....</b>	<b>15</b>
<b>Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan         Yang Dirumuskan.....</b>	<b>24</b>
<b>Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan.....</b>	<b>31</b>

<b>Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....</b>	<b>36</b>
<b>Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan.....</b>	<b>40</b>
<b>Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan .....</b>	<b>48</b>
<b>Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan.....</b>	<b>50</b>
<b>Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan .....</b>	<b>53</b>
<b>Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan / Sarana Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan.....</b>	<b>59</b>
<b>Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>110</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
<b>4.1.Kesimpulan.....</b>	<b>110</b>
<b>4.2.Permasalahan .....</b>	<b>112</b>
<b>4.3.Rekomendasi Tindak Lanjut .....</b>	<b>112</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024 .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2024 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%).....	16
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk).....	25
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Produk Yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan Sertifikat (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) .....	32
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)	36
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit) .....	41
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang).....	49
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%).....	50
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pabrik Es Portable yang dibangun (unit).....	54
Tabel 11. Tabel Penerima Pabrik Es Portable.....	54
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Chest Freezer yang disediakan (unit).....	60
Tabel 13. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Chest Freezer .....	61
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) ..	64
Tabel 15. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan .....	65
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit) .....	68
Tabel 17. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen .....	69
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan (unit) .....	73
Tabel 19. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) .....	74
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan	

Keamanan Pangan (UMKM).....	78
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM).....	85
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) .....	91
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan (Nilai).....	96
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan (Indeks) .....	97
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai) .....	99
Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) .....	100
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%).....	102
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi).....	103
Tabel 29. . Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%).....	104
Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%) .....	106
Tabel 31. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 .....	106
Tabel 32. Ikhtisar Pencapaian Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%).....	109

# Daftar Gambar

Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia ..... 4

Gambar 2. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ..... 6

Gambar 3. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW IV Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjajaku ..... 11

Gambar 4. Rapat Koordinasi Tim Analisa Data ..... 19

Gambar 5. Rapat Koordinasi Minat Pemanfaatan Integrated Cold Storage (ICS) .... 21

Gambar 6. Koordinasi Dalam Rangka Penentuan Titik Koordinat Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar (UPI MB ..... 22

Gambar 7. Kegiatan penghitungan prognosa capaian Volume Produk Olahan (VPO) ..... 23

Gambar 8. Rapat Review Pendataan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar ..... 23

Gambar 9. Rapat Fasilitasi Sosialisasi Mekanisme Dukungan UNIDO ..... 27

Gambar 10. Rapat dalam rangka Pembahasan Usulan Seaweed Food Safety pada agenda CODEX..... 27

Gambar 11. Rapat Pembahasan Kaji Ulang Tahun 2024 dan Usulan PNPS 2025 Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan ..... 28

Gambar 12. Rapat Wawancara Penilaian *Onsite* Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2024 ..... 29

Gambar 13. Talk Show Pengembangan dan penerapan SNI produk kelautan dan perikanan..... 30

Gambar 14. Rapat Konsensus RSNI3 ..... 31

Gambar 15. Persiapan sistem pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sekaligus mempersiapkan persyaratan perolehan Sertifikasi ISO 9001:2025..... 34

Gambar 16. Rapat Koordinasi Pembinaan Mutu bagi UPI Skala Mikro Kecil ..... 35

Gambar 17. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ..... 35

Gambar 18. Rapat Penyusunan Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil ..... 38

Gambar 19. Rapat Penyusunan Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil ..... 39

Gambar 20. Rapat Buku Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil.....	40
Gambar 21. Rapat Monitoring Progres Pembangunan UPI NT HPI .....	43
Gambar 22. Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen terkait Uji Substansi Pelaksanaan PBJ .....	44
Gambar 23. Rapat Monitoring Progres Pengadaan Mesin UPI NT HPI .....	45
Gambar 24. Rapat Show Cause Meeting UPI NT HPI .....	46
Gambar 25. Rapat Persiapan Operasional UPI NT HPI dengan BPOM.....	47
Gambar 26. Uji Coba Mesin Pembuatan HPI .....	48
Gambar 27. Validasi data dan penghitungan nilai pengolahan hasil perikanan (NTPHP).....	53
Gambar 28. Rapat Koordinasi Pengadaan Pabrik Es Portable .....	56
Gambar 29. Rapat Koordinasi Awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Rantai Dingin .....	57
Gambar 30. Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pabrik Es Portabel di Kab. Lampung Selatan .....	58
Gambar 31. Pabrik Es Portable di 10 lokasi .....	59
Gambar 32. Rapat Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah <i>Chest Freezer</i> .....	62
Gambar 33. Serah terima Chest Freezer kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .....	63
Gambar 34. Rapat Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan .....	66
Gambar 35. serah terima Peralatan Pengolahan kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .....	67
Gambar 36. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Rumpuk.....	70
Gambar 37. Rapat Koordinasi Pemenuhan SKP di Sarana Pasca Panen .....	71
Gambar 38. serah terima Sarana Pasca Panen kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .....	72
Gambar 39. Rapat Koordinasi Pemenuhan SKP di Sarana Pasca Panen .....	76
Gambar 40. serah terima Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.....	77

Gambar 41. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bedah UPI .....	80
Gambar 42. Pembinaan Rencana Kegiatan DAK Bedah UPI Tahun 2025 .....	81
Gambar 43. Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan .....	82
Gambar 44. Pembinaan Pengurusan Izin Edar MD, Halal dan Merek.....	83
Gambar 45. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan .....	84
Gambar 46. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan .....	87
Gambar 47. Sosialisasi Fortifikasi HPI Pada Produk Olahan Pangan .....	88
Gambar 48. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan .....	89
Gambar 49. Kampanye Protein Ikan Melalui Makan Bergizi Gratis Menu Ikan Dalam Rangka Hari Ikan Nasional.....	90
Gambar 50. Asistensi Perbaikan Peringkat PROPER .....	93
Gambar 51. Seminar <i>Catfish Day</i> .....	94
Gambar 52. Pembahasan Kajian / <i>Policy Brief</i> Hilirisasi Tuna .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Volume Produk Olahan (VPO) hasil perikanan bernilai tambah dan Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan (NTPHP), pada Triwulan IV tahun 2024 capaian VPO sebesar 7,70 juta ton (prognosa) dan untuk capaian Kenaikan NTPHP adalah sebesar 0,26%. Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja

berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan menyusun “Laporan Kinerja Triwulan IV Direktorat Pengolahan 2024”.

## **1.2.Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **1.3.Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pembinaan mutu meliputi standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan Kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- c. Penyiapan Penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- d. Penyiapan Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;

- e. Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.

Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan

#### 1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan pada Tahun 2024 berjumlah 70 orang dengan komposisi 49 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 8 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 32 orang dan Wanita sebanyak 38 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan II/c sebanyak 2 orang, II/d sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 2 orang, III/b sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 5 orang, III/d sebanyak 13 orang, IV/a sebanyak 10 orang, IV/b sebanyak 5 orang, IV/c sebanyak 2 orang, IV/d sebanyak 1 orang, IV/e sebanyak 1 orang. Non golongan ada 21 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

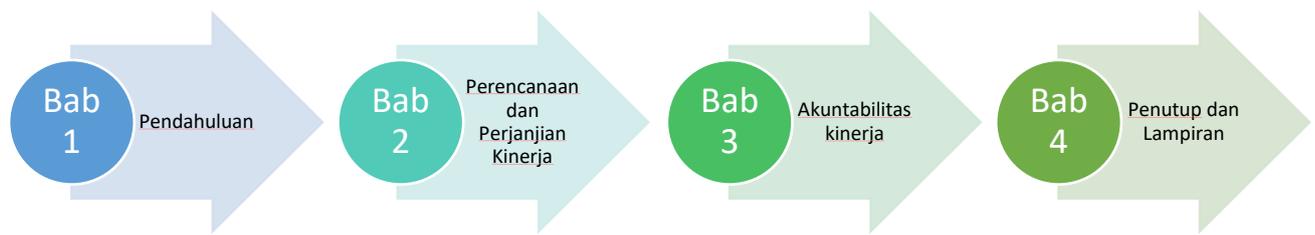
### 1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengolahan dan pembinaan mutu produk perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan permasalahan sektor riil yang dihadapi stakeholders/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti : penanganan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana. Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikrokecil, usaha menengah besar kelautan dan perikanan, serta tantangan lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian dan diselesaikan. Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro-kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perijinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana

pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, traceability) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan. Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, Traceability), dan belum memiliki sertifikat lingkungan.

#### **1.6. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan IV Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Tahun 2024. Pencapaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2024 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Triwulan IV Tahun 2024 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

**“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”**

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

### 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2024
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	12
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapatkan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Good Manufacturing Practices (GMP)/HACCP (Produk)	10.000
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	1
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	38.159
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8	Tersedianya Sarana Sistem Rantai Dingin dan	8	Pabrik es <i>portable</i> yang disediakan (Unit)	10

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2024
	Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	9	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	311
9	Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	165
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
10	Tersedianya Sarana Pengolahan MP Korporasi	12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
11	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
12	Terlaksananya UPI Skala Menengah Besar yang dibina	15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
13	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan (Nilai)	75
		17	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87

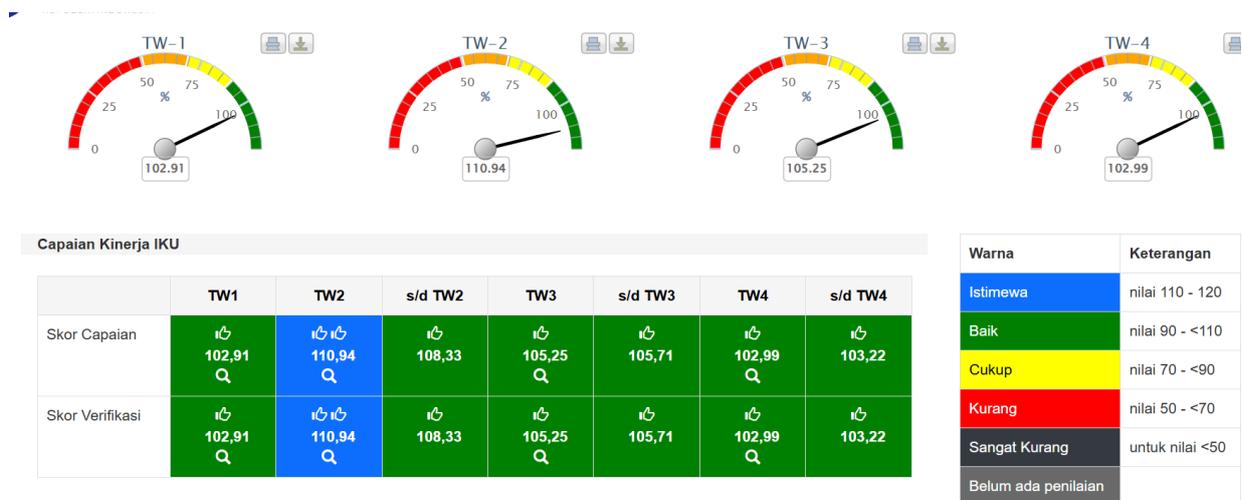
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
		18 Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	84
		19 Persentase Penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	100
		20 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	80
		21 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi)	1
		22 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	94
		23 Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan (%)	95
		24 Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	80

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 24 indikator kinerja yang terdiri dari 11 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, 10 indikator kinerja bersifat triwulanan, dan 2 indikator kinerja bersifat bulanan. Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Oktober sampai dengan Desember 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada triwulan IV sebesar 102,99. Adanya penurunan 2,26 poin atau 2,15% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 2,25 poin atau 2,14%.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian TW IV Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi		% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV
1	Utilitas UPI yang meningkat	1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68	68	68,26	68,26	100,38	100,38
2	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	12	12	15	15	120,00	120,00
3	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3	Produk yang mendapatkan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Good Manufacturing Practices (GMP)/HACCP (Produk)	10.000	7.502	10.000	7.513	100,00	100,15
4	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3	3	3	3	100,00	100,00
5	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk KP	5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	1	1	1	1	100,00	100,00
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan	6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	38.159	38.159	38.159	38.159	100,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		% Terhadap Target		
			TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV	
	perikanan								
7	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25	0,26	0,26	0,26	104,00	104,00
8	Tersedianya Sarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	8	Pabrik es <i>portable</i> yang disediakan (Unit)	10	10	10	10	100,00	100,00
		9	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	311	311	311	311	100,00	100,00
9	Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	165	165	165	165	100,00	100,00
		11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9	9	9	9	100,00	100,00
10	Tersedianya Sarana Pengolahan MP Korporasi	12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8	8	8	8	100,00	100,00
11	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
		14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875	875	875	875	100,00	100,00
12	Terlaksananya UPI Skala Menengah	15	UPI skala menengah besar yang dibina	500	80	540	80	108,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		Realisasi		% Terhadap Target	
				TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV
	Besar yang dibina		(Industri)						
13	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan	16	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan (Nilai)	75	75	84,03	84,03	112,04	112,04
		17	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	87	87	88,1	88,1	101,26	101,26
		18	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	84	84	84	84	100,000	100,000
		19	Persentase Penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	100	100	100	100	100,000	100,000
		20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	80	80	89,47	89,47	111,84	111,84
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi)	1	1	1	1	100,00	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		% Terhadap Target		
			TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV	TAHUN 2024	TW IV	
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	94	94	133,33	133,33	120,00	120,00
		23	Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan (%)	95	95	99,87	99,87	105,13	105,13
		24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)	80	80	84,07	84,07	105,09	105,09

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

#### Kegiatan 1. Utilitas UPI Yang Meningkatkan

##### IK 1. Persentase Utilitas UPI yang Meningkatkan

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan

ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	2024	68	68,26	100,38	62,26	68,26	109,64
	2023	68	68,33	100,49			
	2022	67	67	100,00			
	2021	66	64,88	98,30			
	2020	60	60,54	100,90			

Capaian indikator kinerja Perhitungan Utilitas Unit Pengolahan Ikan adalah 68,26% (prognosa), atau setara dengan 100,38% dari target tahun 2024 sebesar 68%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 68,33% atau setara 100,49% dari target 68%, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -0,10%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -0,10%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 67% atau setara 100,00% dari target 67%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,99%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 0,49%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 64,88% atau setara 98,30% dari target 66%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,27%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 1,73%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 60,54% atau setara 100,90% dari target 60%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 7,17%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -2,57%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka penghitungan utilitas sebesar Rp. 166.722.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 165.961.400,- atau sebesar 99,54% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 760.600,- atau setara 0,46%, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 760.600,- atau setara

0,46%.

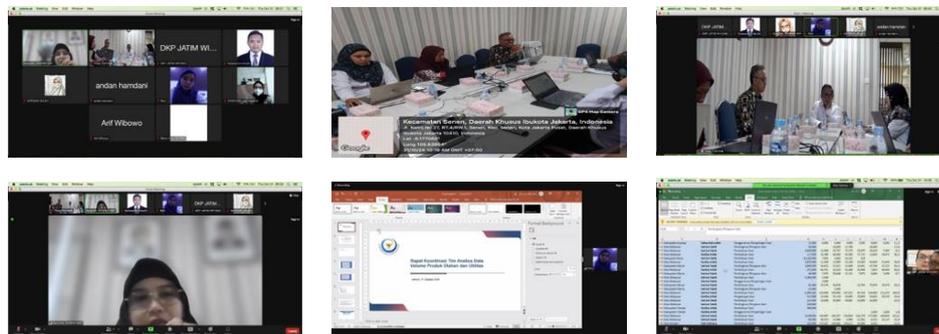
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, adalah data yang belum terstandar sehingga membutuhkan waktu untuk cleansing. Adapun keberhasilan atau pencapaian adalah kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah perlu dilakukannya pemutakhiran/pembaruan populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

### **1. Rapat Koordinasi Tim Analisa Data**

- Rapat dilaksanakan pada 31 Oktober 2024, dipimpin oleh Katimja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah Besar (PUP2MB), dibuka oleh Direktur Pengolahan, dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Statistik Industri BPS, Peneiliti Sosek IPB University, DKPKP Provinsi DKI Jakarta, DKP Provinsi Jawa Timur, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, BPPMHKP, Timja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, dan anggota Timja PUP2MB. Rapat dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat SKP, Gedung Mina Bahari III Lantai 13 dan daring melalui aplikasi meeting ZOOM.
- Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran dalam kegiatan Perhitungan Volume Produksi dan Utilitas Pengolahan Hasil Perikanan Skala Menengah Besar yang telah dilakukan selama TW 1 s/d TW 3 Tahun 2024.
- Sampai dengan saat ini perhitungan volume produk olahan telah dilakukan terhadap data dari bulan Januari hingga September tahun 2024. Terdapat 13 jenis produk olahan yang dilakukan perhitungan sesuai dengan peraturan tetapi untuk pemindangan tidak dilakukan karena masuk kategori skala Mikro Kecil. Data volume diperoleh dari BPPMHKP, perhitungan hanya dilakukan terhadap data yang masuk dalam kategori konsumsi. Sedangkan untuk data utilitas belum selesai dihitung karena masih menunggu hasil input data sarana dan prasarana;
- Berdasarkan diskusi yang dilakukan diperoleh beberapa poin masukan dalam proses perhitungan volume produksi dan utilitas pengolahan hasil perikanan, sebagai berikut:

- a. DKP Provinsi DKI Jakarta agar dapat mengadakan pertemuan untuk melakukan input data kapasitas sarana dan prasarana;
- b. Ada baiknya mensinkronisasi report yang ada di internal dan eksternal, setiap pengolahan dan perizinan berdasarkan KBLI;
- c. Alangkah baiknya dalam proses perhitungan, responden yang digunakan sebanyak 70% dari populasi;
- d. Pada tahun 2024 ini harapannya adanya Tim Analisa Data, maka datanya dapat bunyi ada analisa terhadap angka-angkanya;
- e. Di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 ini terjadi penurunan produksi pembekuan. Agar dapat digali lebih mendalam informasi terkait penurunan produksi tersebut;
- f. Di Provinsi Jawa Timur, kondisi produksi perikanan cukup beragam. Untuk UPI dengan produk olahan kering minim sekali mengalami losses. Terdapat kendala di pasar ekspor untuk produk pengeringan;
- g. Perlunya dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari lapangan;
- h. Hilirisasi harus dibarengi dengan efisiensi sehingga produk perikanan Indonesia dapat kompetitif dibandingkan dengan negara lain;
- i. Perlu intervensi dari pemerintah agar UPI dapat tetap bertahan;
- j. Perlu mencari waktu yang pas untuk pengambilan data, karena temen UPI punya kesibukan;
- k. Data perikanan menarik, bisa saja saat ini produksi nanti tidak produksi, maka perlu terus di update. Untuk kapastisa terpasang jika belum ada update bisa menggunakan data kapsaitas lama;
- l. Tren produksi perikanan tangkap cenderung stagnan, target produksinya cenderung menurun, kedepan produksi budidaya yang mejadi fokus, maka perlu disesuaikan dengan pengolahannya;
- m. Perlu disinkornkan data pengolahan dengan data penangkapan dan budidaya, disandingkan dengan pola musim, ada isu-isu terkait



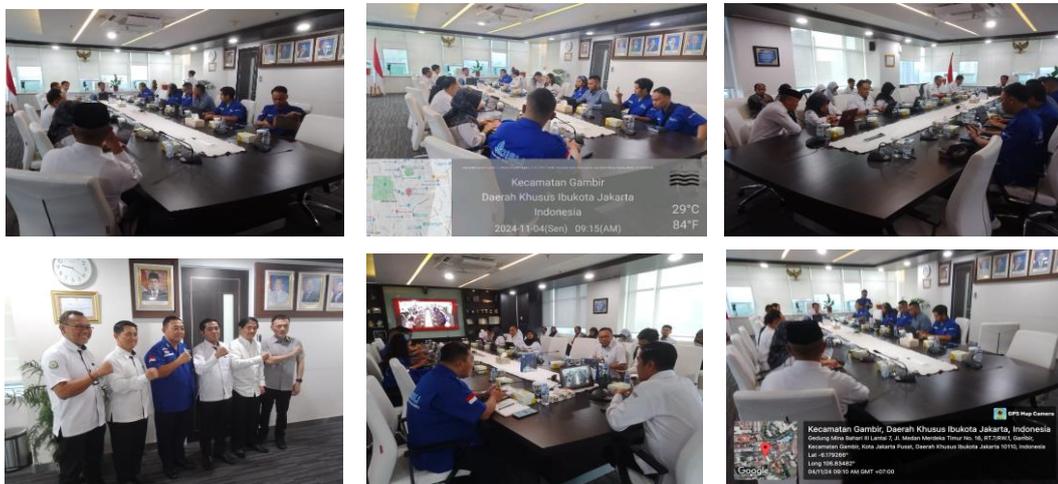
Gambar 5. Rapat Koordinasi Tim Analisa Data

## 2. Rapat Koordinasi Minat Pemanfaatan *Integrated Cold Storage (ICS)* di PPI Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

- Rapat yang semula akan diadakan di Ruang Rapat SKP Lantai 12 A dilaksanakan secara hybrid di ruang rapat Mutiara Lt 14 GMB 3 KKP. Rapat dibuka oleh Dirjen PDSPKP, dipandu oleh Direktur Logistik dan dihadiri perwakilan dari Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), Direktur PT. Big Marlin, Setditjen. Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perikanan Tangkap (DJPT), Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Eselon II lingkup Ditjen. PDSPKP.
- Rapat Koordinasi ini dilakukan sehubungan dengan adanya minat pemanfaatan *integrated cold storage (ICS)* di PPI Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dari PT Big Marlin melalui Tim GISLI (Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia) selaku mitra kerja Ditjen PDSPKP. Berikut poin- poin yang dapat dilaporkan dalam rapat tersebut.
- Dirjen. PDSPKP dalam sambutannya menyampaikan ICS Natuna yang berlokasi di Selat Lampa dibangun pada Tahun 2016. Pada Akhir Tahun 2023 pengelolaannya sudah diserahkan ke DJPT, dan saat ini sudah menjadi aset Ditjen. Perikanan Tangkap. Diharapkan melalui pertemuan ini DJPT dapat memberikan update informasi terkait pemanfaatan ICS saat ini serta hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengelola yang berminat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun PT Big Marlin dapat menyampaikan rencana bisnis dan persiapan yang telah dilakukan dalam rangka mengelola ICS dimaksud. Jika kerjasama pemanfaatan ini berjalan, maka dapat menjadi *role*

*model* untuk ICS lainnya yang belum operasional. Hal ini penting dilakukan karena ICS merupakan bagian dari program pemerintah yang mendukung swasembada pangan dan merupakan Gudang protein. Diharapkan setelah termanfaatkan, akan tetap dilakukan rapat evaluasi per 3 bulan.

- Saat ini di Indonesia terdapat total 2110 *cold storage* (milik pemerintah dan swasta) dengan total kapasitas 850 ribu ton per tahun. Perairan di sekitar Natuna masuk Zona 1 WPP. Direktorat Logistik mendukung upaya pemanfaatan ICS selat Lampa melalui kerjasama dengan PT. Big Marlin, namun hal yang perlu dipertimbangkan adalah informasi terkini ICS dari DJPT sebagai pemilik aset dan bagaimana pemanfaatan ICS dimaksud.
- Terdapat 688 pelabuhan perikanan nasional baik yang dikelola pusat maupun daerah dengan klasifikasi yaitu 22 pelabuhan UPT Pusat yang merupakan binaan langsung KKP, 9 pelabuhan perikanan perintis yang embrionya dari Kawasan SKPT, dan sisanya adalah PPN dan PPS.  
DJPT menyambut baik adanya rencana pemanfaatan ICS Natuna dari PT Big Marlin, namun pada Juli 2024 sudah ada pihak lain yang juga mengusulkan untuk mengelola ICS Natuna. Usulan tersebut saat ini sedang diproses di Kemenkeu. PT. Big Marlin yang juga berminat untuk mengelola ICS Natuna dimohon menunggu hasil review dari Kemenkeu atas usulan pihak yang lebih dahulu mengajukan.
- Pemanfaatan ICS adalah sesuai Permenkeu 115, yaitu dimungkinkan melalui skema sewa atau pinjam pakai. Untuk ICS yang sudah menjadi aset DJPT, selanjutnya calon peminat dapat berkoordinasi dengan DJPT. DJPT terbuka untuk setiap pihak yang berminat dalam mengelola ICS tersebut, tapi tentu melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya GISLI dan PT. Big Marlin dapat berkoordinasi dengan DJPT.
- Ditjen PDSPKP siap mendukung upaya pemanfaatan BMN dalam mendukung ekonomi masyarakat perikanan yang semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Termasuk atas minat PT. Big Marlin ini, Ditjen PDSPKP memberikan apresiasi. Selanjutnya disarankan Gisli dan PT. Big Marlin selaku peminat pengelola ICS selat Lampa dapat berkomunikasi dengan DJPT.

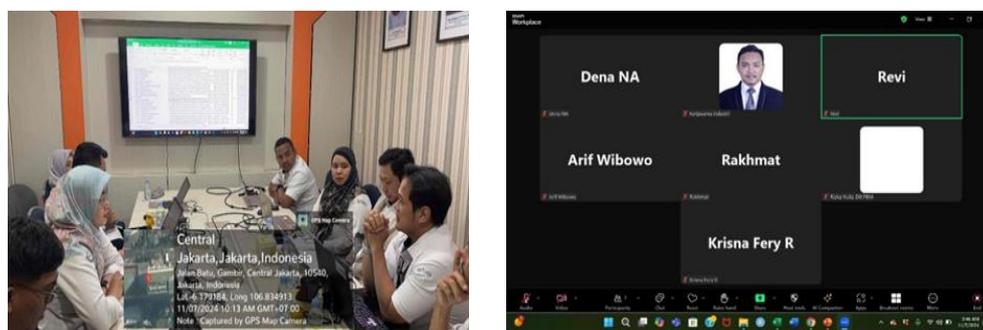


Gambar 6. Rapat Koordinasi Minat Pemanfaatan Integrated Cold Storage (ICS)

### 3. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penentuan Titik Koordinat Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar (UPI MB)

- Rapat dilaksanakan pada 7 November 2024 di Ruang SKP Lt. 13, dipimpin PJ Data VPO MB dan dihadiri Ketua Tim Kerja PUP2MB secara online, Tim Kerja Data Statistik Pusdatin, Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, dan Timja PUP2MB.
- Rapat bertujuan membahas solusi atas permasalahan yang ditemui saat dilakukan penentuan titik koordinat. Dari 1.480 UPI MB yang ditentukan titik koordinatnya, sekitar 300 dapat ditentukan menggunakan aplikasi pemetaan oleh Pusdatin, dan sisanya belum dapat dilakukan pemetaan, sehingga dilakukan secara manual satu persatu menggunakan google map.
- Tim Pusdatin menyampaikan rambu-rambu dalam menentukan titik koordinat, sebagai berikut : (1) Jika nama UPI tidak ditemukan pada google map atau ada nama upi yang sama namun berbeda kabupaten atau provinsi, maka agar menggunakan alamat UPI sebagai basis pengecekan titik koordinat, yaitu dengan mengetikkan kelurahan, kecamatan dan kabupaten lokasi UPI dimaksud pada google map, dan kemudian ditentukan oleh kita satu titik sebagai lokasi koordinat di wilayah tersebut. (2) Dengan memetakan koordinat lokasi UPI, maka dapat diketahui berapa jumlah UPI yang terdapat dalam satu wilayah. Adapun untuk

data lain terkait UPI jika ingin ditampilkan di peta yang dibuat Pusdatin, maka data-data dimaksud dapat diberikan kepada Pusdatin, misalnya kapasitas, jenis olahan, dan volume produksi. Adapun untuk data-data yang sifatnya rahasia seperti asset dan omset tidak dapat ditampilkan untuk umum dan hanya dapat ditampilkan untuk keperluan pimpinan.



Gambar 7. Koordinasi Dalam Rangka Penentuan Titik Koordinat Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar (UPI MB)

#### 4. Laporan Kegiatan penghitungan prognosa capaian Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah Besar (MB) Tahun 2024

- Kegiatan penghitungan prognosa capaian Volume Produk Olahan (VPO) dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah Besar (MB) Tahun 2024 dilaksanakan pada 16-17 Desember 2024 di Hotel 101 Bogor yang dihadiri Tim Penghitungan dan Analisis Data VPO UPI MB serta akademisi IPB, Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) dan Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I).
- Prognosa capaian Volume Produk Olahan (VPO) UPI MB tahun 2024 sebesar 2,69 juta ton setara utuh segar dari target VPO nasional sebesar 7,5 juta ton (berkontribusi 36%). Sedangkan prognosa tingkat utilitas UPI MB tahun 2024 sebesar 68,26% dari target tingkat utilitas UPI MB sebesar 68%.
- Pengumpulan data VPO UPI MB tahun 2024 dilaksanakan di 38 provinsi di Indonesia. Pendataan dilakukan terhadap 12 jenis kegiatan UPI meliputi : pendinginan/ pengesakan ikan, pembekuan ikan, penggaraman/ pengeringan ikan, pengasapan/ pemanggangan ikan, peragian/ fermentasi ikan, pengalengan ikan, pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, pembuatan minyak ikan, pengolahan rumput laut,

penanganan ikan, dan pengolahan lainnya.

- Pendataan dan perhitungan VPO UPI MB bersumber dari data Dokumen Keluaran (Dokel) dan data lalu lintas ekspor dari BPPMHKP bulan Januari-November 2024 serta data dari Badan Karantina Indonesia bulan Oktober-November 2024. Sedangkan perhitungan tingkat utilitas UPI MB menggunakan data kapasitas sarana produksi yang dicacah oleh enumerator daerah. Perhitungan VPO bersifat prognosa karena kelengkapan data Bulan Desember belum tersedia.



Gambar 8. Kegiatan penghitungan prognosa capaian Volume Produk Olahan (VPO)

## 5. Rapat Review Pendataan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024

- Rapat Review Pendataan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar Tahun 2024 dilaksanakan pada 24 Desember 2024 di Ruang Rapat SKP Lantai 12A, Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat juga melalui zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB, dan dihadiri oleh perwakilan BPS, Pusdatin, Bagian Data Seditjen PDSPKP, dan Direktorat Pengolahan.
- Data Volume Produk Olahan (VPO) tidak hanya dari BPPMHKP, namun juga dari Badan Karantina. Sehingga perlu adanya perjanjian kerjasama dengan Badan Karantina yang diinisiasi oleh PUSDATIN KKP.
- Selain melakukan pembahasan terkait seputar pendataan, juga dibahas dan disusun matriks daftar inventarisir masalah di Timja PUP2MB.



Gambar 9. Rapat Review Pendataan Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar

## Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan

### **IK 2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan yang Disediakan (Produk)**

Rekomendasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam International Classification for Standards (ICS). Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat. Instansi teknis tersebut salah satunya adalah Direktorat Pengolahan yang membentuk dan mengelola Keanggotaan dan Kesekretariatan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Komtek 65-08 Produk Perikanan Nonpangan. Kedua Komtek tersebut memiliki tugas dalam perumusan dan penyusunan SNI produk perikanan dan produk perikanan nonpangan. Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan : 1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; 2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat; 3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.

Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (e-balloting) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di website SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Disediakan (Produk)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan	2024	12	15	125,00	15	15	100
	2023	15	16	106,67			
	2022	15	20	133,33			
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan adalah 15 produk, atau setara dengan 125,00% dari target tahun 2024 sebesar 12 produk. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 16 produk atau setara 106,67% dari target 15 produk, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -6,25%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 17,19%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 20 produk atau setara 133,33% dari target 15 produk, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -20,00% sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -20,00%. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja rancangan RSNI produk hasil kelautan yang diimplementasikan dengan pagu Rp 1.198.191.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 1.197.614.806,- atau sebesar 99,95% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 576.194,- atau setara 0,05%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV ini adalah konsensus *Ekstrak ikan gabus (Channa striata) sebagai sumber albumin – Syarat mutu dan pengolahan* tidak dapat dilaksanakan bersama dengan 6 RSNI yang produk perikanan nonpangan yang lain sehingga jajak pendapat untuk RSNI ekstrak ikan gabus sebagai sumber albumin dilaksanakan di Januari 2025. Adapun yang

menjadi faktor keberhasilan pada triwulan IV adalah Komite Teknis 65-05 berhasil mendapatkan nominasi Herudi Technical Committee Award (HTCA) yang merupakan penghargaan dari BSN kepada komite teknis dalam pengembangan SNI. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah kedepannya dalam penyusunan RSNI data dukung harus disiapkan lebih lengkap dan untuk RSNI yang terdapat prosedur uji harus sudah divalidasi.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), yaitu :

### **1. Rapat Fasilitasi Sosialisasi Mekanisme Dukungan UNIDO**

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting. Rapat dihadiri oleh perwakilan BBP3KP, BPMHP Kelas A Semarang, BPPP Tegal, UNIDO GQSP Indonesia Fase 2, dan perwakilan 5 pelaku UMK pengolah hasil perikanan.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk tindak lanjut dukungan pembinaan penerapan SNI UMK bandeng dan fasilitasi sosialisasi mekanisme dukungan UNIDO.
- Sosialisasi dukungan UNIDO kepada pelaku UMK sebagai vendor yang melakukan sertifikasi SNI meliputi: persyaratan berkas administrasi dan data bank yang perlu dipersiapkan oleh pelaku UMK, pengecekan data yang tertera pada *invoice* yang diterima pelaku UMK, dan periode proses pembayaran dari UNIDO kepada pelaku UMK. Pembayaran reimburse pengujian terkait sertifikasi SNI akan dibayar oleh UNIDO setelah UMK melengkapi berkas uji lab dan berkas terkait lainnya.

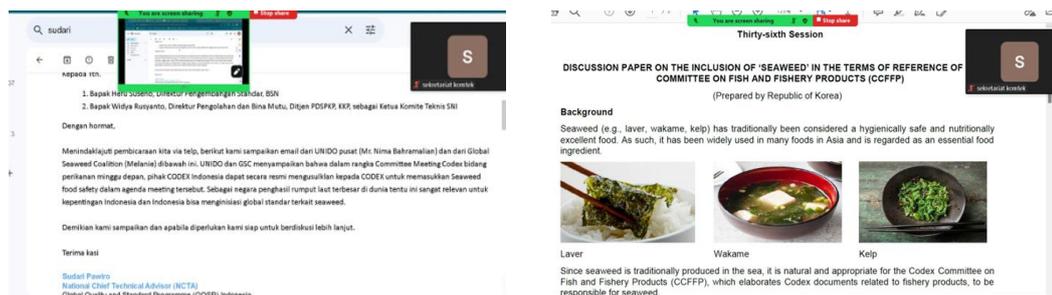
UNIDO melakukan pembayaran melalui sistem *global banking*, sehingga nama UMK yang terdata di UNIDO harus sama dengan nama yang terdaftar untuk nama rekening bank. Pengecualian dapat diberikan jika menggunakan NIB asal rekening yang terdaftar di NIB sama dengan rekening yang didaftarkan ke pihak UNIDO atau menggunakan nama koperasi. Pembayaran ke rekening vendor atas nama pribadi hanya dapat dilakukan dengan nominal kecil.



Gambar 10. Rapat Fasilitasi Sosialisasi Mekanisme Dukungan UNIDO

## 2. Rapat dalam rangka Pembahasan Usulan Seaweed Food Safety pada agenda CODEX

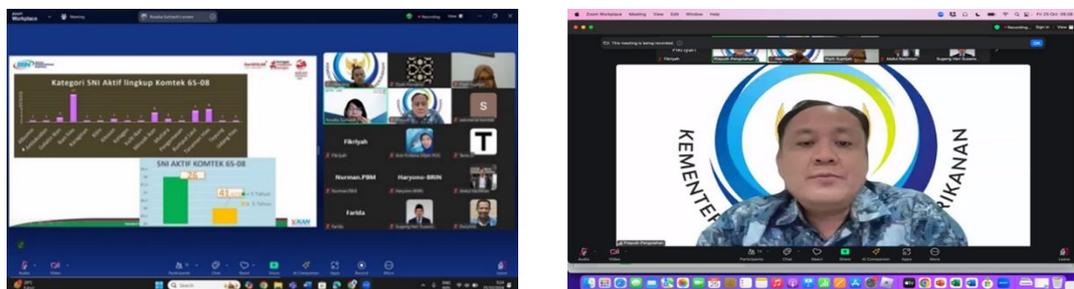
- Rapat dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Standar Agro Kimia Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian, BSN beserta tim BSN, National Chief Advisor UNIDO (Bapak Sudari), dan tim kerja Pengembagnagn dan Penerapan Standar.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah menindaklanjuti komunikasi UNIDO, KKP dan BSN terkait dengan potensi untuk mengusulkan rumput laut dalam standar Codex.
- Sampai saat ini belum ada ruang lingkup rumput laut dalam Codex. Codex Committee on Fish and Fisheries product yang menangani ikan dan produk perikanan belum mengakomodir rumput laut. Korea Selatan akan mengajukan penambahan TOR atau ruang lingkup rumput laut pada CCFFP pada sidang CCFFP yang akan diselenggarakan tanggal 7-17 Oktober 2024. National Chief Advisor UNIDO menyampaikan akan mempertimbangkan kembali pengusulan rumput laut dalam Codex mengingat dokumen yang perlu disiapkan dan tahapan yang harus dilalui.



Gambar 11. Rapat dalam rangka Pembahasan Usulan Seaweed Food Safety pada agenda CODEX

### 3. Rapat Pembahasan Kaji Ulang Tahun 2024 dan Usulan PNPS 2025 Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari anggota komtek 65-05 dan 65-08, BSN dan sekretariat komtek 65-05 dan 65-08.
- Rapat bertujuan untuk membahas kaji ulang SNI dan menindaklanjuti surat penjangingan usulan PNPS tahun 2025 dari Dit. PBM yang ditujukan kepada *stakeholder* dengan nomor surat B.3378/DJPDSPKP.4/PDS.210/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
- Direktorat Pengolahan menyampaikan hasil kaji ulang SNI Komtek 65-05 dan 65-08 Kepada BSN. Mengingat target dan anggaran Perumusan standar tahun 2024 sebanyak 4 RSNI, maka diusulkan pada tahun 2025 Dit. Pengolahan untuk mengusulkan PNPS RSNI produk Perikanan (Komtek 65-05) sebanyak 4 RSNI, sedangkan usulan PNPS RSNI Produk Perikanan non pangan (Komtek 65-08) sebaiknya diusulkan pada tahun 2026. Direktorat Pengolahan akan menyampaikan surat usulan PNPS 2025 RSNI Produk Perikanan sebelum tanggal 31 Oktober 2024 kepada BSN.



Gambar 12. Rapat Pembahasan Kaji Ulang Tahun 2024 dan Usulan PNPS 2025 Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan

### 4. Rapat Wawancara Penilaian *Onsite* Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2024

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024, bertempat di RR SKP GMB III It 13. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar, BSN (Triningsih Herlinawati) beserta evaluator penilaian HTCA 2024 (Nurhana Rafika Sari; Fitriana Khoirunnisa; Mahardika Brave Revaldiwansyah); dan tim kerja Pengembangan dan Penerapan Standar.

- Rapat bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait kinerja dari komtek yang dinyatakan lulus 18 besar dari 81 Komtek yang mendaftar HTCA.
- Hasil penilaian on-site akan menentukan nominasi 3 besar komtek penerima HTCA. Penerima penghargaan HTCA 2024 akan diumumkan pada acara Bulan Mutu Nasional 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024.



Gambar 13. Rapat Wawancara Penilaian *Onsite* Herudi Technical Commitee Award (HTCA) 2024

## 5. Talk Show Pengembangan dan penerapan SNI produk kelautan dan perikanan

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024, bertempat di Ruang Mera 1, Jakarta Convention Center. Dihadiri oleh 102 orang peserta offline yang terdiri dari pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro-kecil dan menengah-besar, UNIDO, Dinas KP Provinsi DKI Jakarta, serta Anggota Komtek SNI 65-05 dan SNI 65-08 dan 283 orang peserta online dan 361 orang live streaming youtube dari DKP, pelaku usaha, Ditjen PDSPKP
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman urgensi penerapan SNI produk perikanan kepada stakeholder terkait dan meningkatkan awareness penerapan SNI produk perikanan kepada pelaku usaha perikanan.
- Pemerintah akan terus mendorong kesadaran semua stakeholder dalam menerapkan SNI melalui pembinaan, edukasi, dan sosialisasi kepada pelaku

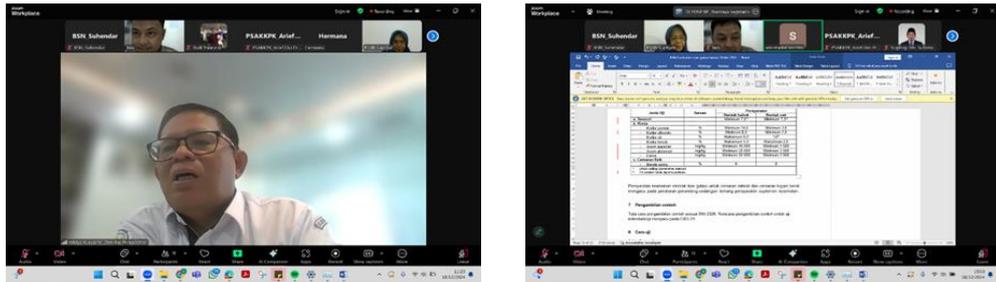
usaha maupun masyarakat pengguna. Sertifikasi gratis bagi UMKM akan menjadi perhatian pemerintah. Usulan pelaku usaha agar ada pengakuan atau keberterimaan antar sertifikasi akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.



Gambar 14. Talk Show Pengembangan dan penerapan SNI produk kelautan dan perikanan

## 6. Rapat Konsensus RSNI3 Bubuk ekstrak albumin ikan gabus (*Channa striata*) sebagai sumber albumin - syarat mutu dan pengolahan

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di RR Setditjen PDSPKP GMB III It 14. Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-08, konseptor, sekretariat komtek 65-08 sekaligus editor RSNI Produk Perikanan Nonpangan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal – BSN. Rapat dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Bina Mutu selaku Ketua Komtek 65-08.
- Tujuan dilaksankannya rapat tersebut adalah membahas RSNI2 *Ekstrak ikan gabus (Channa striata) sebagai sumber albumin – Syarat mutu dan pengolahan* menjadi RSNI3.
- Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan telah membahas dan menyepakati beberapa perubahan dalam RSNI2 8074:20YY, *Ekstrak ikan gabus (Channa striata) sebagai sumber albumin – Syarat mutu dan pengolahan*. Berdasarkan hasil pembahasan RSNI3 yang telah dilaksanakan secara offline dan online, Komite Teknis menyepakati dan selanjutnya akan diajukan ke BSN untuk dilanjutkan ke tahap Jajak Pendapat.



Gambar 15. Rapat Konsensus RSNI3

### Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

#### IK 3. Produk Yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / *Good Manufacturing Practies (GMP)* / HACCP

Produk olahan hasil perikanan yang mendapatkan Pembinaan Kelayakan Pengolahan (SKP) karena unit pengolahan ikan nya belum menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (GMP) dan belum memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (SSOP). Produk Yang Mendapat Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / *Good Manufacturing Practices (GMP)* / HACCP Sesuai amanah UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan memperoleh SKP.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Produk Yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan Sertifikat Kelayakan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Produk Yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/ <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	2024	10.000	10.000	100,00		10.000	
	2023	5.000	5.703	114,06			
	2022	3.500	3.614	103,26			
	2021	2.650	4.085	154,15			
	2020						

Capaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk) adalah 10.000 produk, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 10.000 produk. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 5.703 produk atau setara 114,06% dari target 5.000 produk, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 75,3%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -12,33%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 3.614 produk atau setara 103,26% dari target 3.500 produk, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 57,8%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 10,46%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 4.085 produk atau setara 154,15% dari target 2.650 produk, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -11,5%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -33,02%. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebesar Rp 1.500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 1.473.858.824,- atau sebesar 99,60% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 5.949.176,- atau setara 0,4 %.

Sehubungan dengan perubahan organisasi di KKP sesuai dengan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP bahwa Direktorat Pengolahan melaksanakan fungsi pembinaan mutu sedangkan pelayanan sertifikasi menjadi kewenangan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka IKU 3: Produk yang Mendapatkan SKP telah diusulkan berubah menjadi : Produk yang mendapatkan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/ *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ HACCP. Produk yang telah mendapatkan pembinaan mutu selama Tahun 2024 sesuai dengan target pada tahun 2024 yang telah ditetapkan yaitu 10.000 produk.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV tahun 2024 adalah belum optimalnya kegiatan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan karena masih terdapat ketidak seragaman pemahaman para Pembina Mutu terhadap Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada triwulan IV tahun 2024 adalah Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2025 untuk sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan keberhasilan Direktorat Pengolahan yang didukung oleh faktor koordinasi pembinaan yang baik antara seluruh Tim Kerja Direktorat Pengolahan. Rekomendasi yang akan dilaksanakan untuk kegiatan kedepannya yaitu, melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Managemen Mutu agar kegiatan pembinaan mutu pada tahun 2025 dapat mencapai target.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk), yaitu:

**1. Mempersiapkan sistem pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sekaligus mempersiapkan persyaratan perolehan Sertifikasi ISO 9001:2025 untuk sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan melalui, yaitu:**

- a. Penyusunan dokumen ISO 9001:2025 di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024;
- b. Audit internal ISO 9001:2025 di Jakarta pada tanggal 29 November 2024 dan 2

Desember 2024;

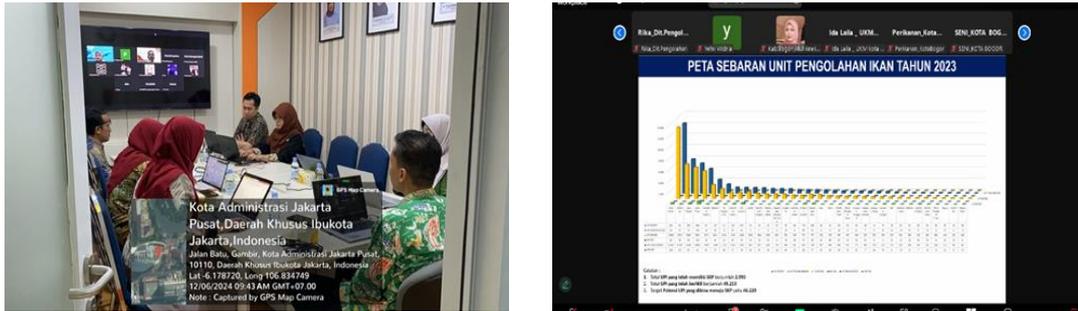
- c. Kaji Ulang Manajemen ISO 9001:2025 di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2024;
- d. Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2025 di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2024;
- e. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2025 untuk sistem Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 dari PT. QAI Indonesia.



Gambar 16. Persiapan sistem pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sekaligus mempersiapkan persyaratan perolehan Sertifikasi ISO 9001:2025

## 2. Rapat Koordinasi Pembinaan Mutu bagi UPI Skala Mikro Kecil

- Rapat koordinasi pembinaan bagi UPI Skala Mikro Kecil dilaksanakan secara online untuk DKI Jakarta pada tanggal 4 dan 5 Desember 2024 dan untuk Jawa Barat pada 6 dan 9 Desember 2024. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan para Pembina Mutu DKP Prov. DKI Jakarta dan DKP Prov. Jawa Barat.
- Rapat bertujuan untuk mensosialisasikan cara efektif penyusunan Manual Mutu menggunakan link dimana data yang diisi pada link akan langsung tersimpan pada Manual Mutu. Diharapkan para Pembina Mutu dapat mendampingi para UPI Skala Mikro Kecil di wilayah masing-masing untuk menyusun Manual Mutu sebagai salah satu persyaratan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Diketahui bahwa umumnya UPI Skala Mikro Kecil mengalami kesulitan menyusun Manual Mutu.



Gambar 17. Rapat Koordinasi Pembinaan Mutu bagi UPI Skala Mikro Kecil

### 3. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 di Jakarta. Rapat dibuka oleh Dirjen PDSPKP, yang dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Direktur Pengolahan dan arahan Kebijakan oleh Sesditjen PDSPKP. Hadir secara offline para Pembina Mutu dari DKP Prov. Sumatera Selatan, DKP Prov. Maluku dan DKP Prov. NTT. Sedangkan 261 orang Pembina Mutu dari DKP Prov lainnya hadir secara online.
- Bimtek bertujuan untuk memberikan informasi update tentang pembinaan mutu dari sisi regulasi maupun standar mutu hasil kelautan dan perikanan. Materi update tentang standar mutu hasil kelautan dan perikanan yaitu Pemahaman dan Penerapan Prinsip Umum Higiene Pangan (CXC 1-1969 2020, 2022) disampaikan oleh pakar mutu dari UNIDO (drh. Novia Priyana).



Gambar 18. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

## Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data dan Informasi Publik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

### IK 4. Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan merupakan jumlah data informasi industri pengolahan hasil perikanan yang berupa data losses dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu periode waktu.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan	2024	3	3	100,00		10.000	
	2023	2	2	100,00			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan adalah 3 data, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 3 data. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 2 data atau setara 100,00% dari target 2 data, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 50,00%, sedangkan pertumbuhan capaian tidak dapat dibandingkan karena persentase realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah yang sama. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan sebesar Rp. 161.497.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 160.592.582,- atau sebesar 99,44 % dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 904.418,- atau setara 0,56%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV ini, adalah:

- a. Perlu proses validasi data dukung terkait sebaran UPI skala mikro dan kecil berbasis data UPI dari KUSUKA, skala usaha, volume/kapasitas produksi, jenis olahan, *losses* atau susut hasil, volume produk olahan tahun 2023, serta *success story* UPI binaan Ditjen PDSPKP yang melibatkan koordinasi dengan unit kerja terkait (pusdatin, provinsi, kab, kota)
- b. Jadwal kegiatan tenaga ahli penyusunan penyusunan *profiling* Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang cukup padat
- c. Kesulitan akses pendataan.

Faktor yang menjadi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV, adalah *Profiling* Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil dapat diselesaikan sesuai target waktu dan output yang ditetapkan.

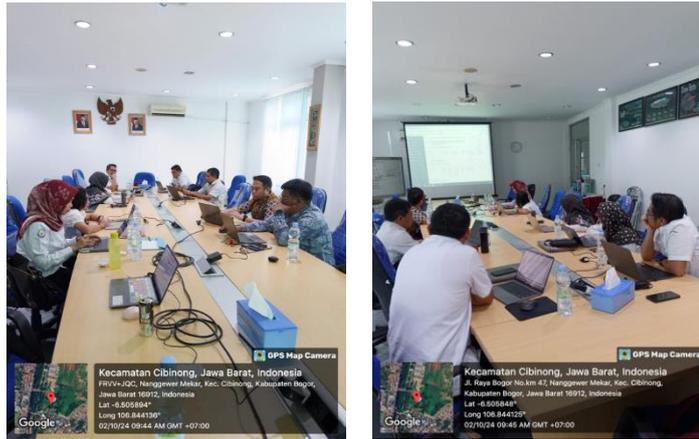
Rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, adalah:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengumpulan data secara daring.
- b. Pemusatan dan Integrasi pendataan melalui aplikasi satu data KKP.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja *profiling* industri pengolahan hasil perikanan yaitu:

### **1. Rapat Penyusunan *Profiling* Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024**

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024, bertempat di R.R. Raiser Ikan Hias, Cibinong. Rapat dihadiri oleh, Dr. Muhamad Darmawan (BPPSDMKP), Syamdidi, S.Pi, M.App.SC (BPPSDMKP), Hasta Octavini, S.TP (BPPSDMKP), perwakilan Tim Kerja Data dan Layanan Publik dan perwakilan Direktorat Pengolahan.
- Tujuan dari pelaksanaan rapat tersebut adalah pembahasan *profiling* UPI Mikro dan Kecil dan pembahasan laporan susut hasil produk perikanan.
- Telah disusunnya laporan susut hasil perikanan, yaitu: susut hasil di tingkat nelayan, susut hasil perikanan di tingkat pengepul, susut hasil perikanan di Tingkat pengecer, dan susut hasil perikanan di tingkat pengolah. Diharapkan penyusunan *profiling* sebaran usaha skala mikro kecil dapat lengkap dan tersusun dengan baik.



Gambar 19. Rapat Penyusunan Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil

## 2. Rapat Penyusunan Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024

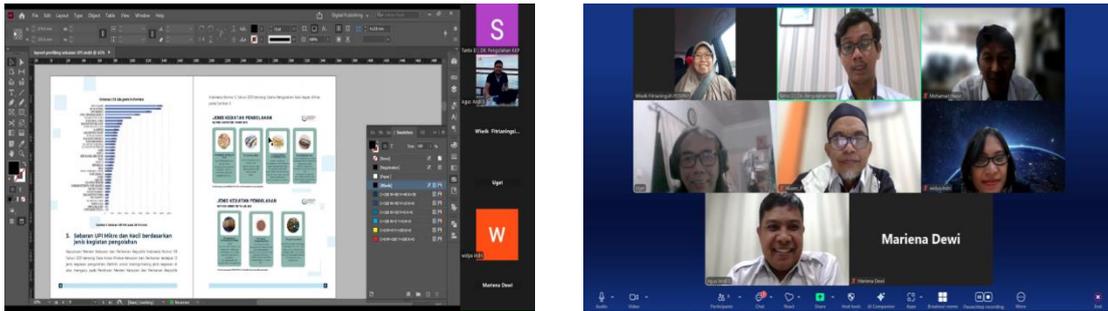
- Rapat dilaksanakan pada 21 Oktober 2024, bertempat di R.R. SKP GMB III, Lt. 13. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data dan Informasi KKP, perwakilan Timja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, dan perwakilan Direktorat Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah untuk pembahasan substansi dalam profiling UPI Mikro dan Kecil yang telah disusun dan pembahasan rencana pelaksanaan penyusunan profiling.
- Dalam rapat dibahas terkait dengan substansi kegiatan yang akan dimasukkan dalam profiling industri pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil yakni:
  - a) sebaran UPI skala mikro dan kecil
  - b) Susut hasil produk perikanan
  - c) Volume produk perikanan
  - d) Pembinaan UPI skala mikro dan kecil
  - e) Sentra pengolahan hasil perikanan
- Progres penyusunan profiling saat ini masih dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan ditargetkan pada akhir bulan November draft akhir sudah diserahkan kepada tenaga ahli infografis untuk disusun dalam sebuah e-book atau file dokumen lainnya.



Gambar 20. Rapat Penyusunan Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil

### 3. Rapat Buku Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2024

- Rapat dilaksanakan pada 10 Desember 2024, bertempat di R.R. SKP GMB III, Lt. 13. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Setditjen PDSPKP, perwakilan Pusdatin KKP, perwakilan Tim Kerja Program Setditjen PDSPKP, Perwakilan Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, dan Perwakilan Tim Kerja di lingkup Direktorat Pengolahan, dan pelaksana Tim Kerja PUP2MK Direktorat Pengolahan.
- Tujuan dari pelaksanaan rapat tersebut adalah untuk Pembahasan pembuatan buku profiling sebaran usaha pengolahan ikan skala mikro dan kecil tahun 2024.
- Buku Profiling UPI MK 2024 dibuat untuk menyajikan data penghitungan VPO 2024 dan sebaran UPI MK serta komoditas produksi hasil perikanan di Indonesia.
- Buku Profiling UPI MK 2024 akan mencakup data penghitungan VPO 2024, sebaran UPI MK di Indonesia, sebaran jenis olahan hasil perikanan yang diproduksi, susut hasil perikanan, VPO UPI MK, pembinaan UPI MK, dan sentra pengolahan ikan.
- Berbagai hal yang perlu dilengkapi terkait buku profiling UPI MK 2024 antara lain foto pendukung kegiatan, rincian detail data dan kegiatan penghitungan VPO 2024 serta pembinaan UPI MK yang telah dilakukan Dit. Pengolahan yang lebih detail, serta perbaikan redaksional dan *layout*.



Gambar 21. Rapat Buku Profiling Sebaran Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil

## Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

### IK 5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)

Jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan beserta paket peralatan pengolahan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah hasil perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH). UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Konsep pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah adalah bentuk Hilirisasi produk perikanan melalui pengolahan berbasis bioteknologi, menggunakan peralatan, tenaga kerja dan standar yang benar untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Teknologi metode hidrolisis atau dengan ekstraksi digunakan untuk mengambil protein ikan, untuk mengambil protein sebagai kandungan penting pada ikan sebagai bahan pangan fungsional yang juga bernilai tinggi.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	2024	1	1	100,00	10.000	10.000	100
	2023	2	2	100,00			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah yang Dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu adalah 1 unit, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 2 unit atau setara 100,00% dari target 2 unit, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -50%, sedangkan pertumbuhan capaian tidak dapat dibandingkan karena persentase realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah yang sama. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit) sebesar Rp 10.700.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 10.672.090.769,- atau sebesar 99,74% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 27.909.231,- atau setara 0,26%.

Secara umum faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah karena tidak berjalannya manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, dan keterlambatan ketersediaan material di lapangan.

Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kota Pekalongan dan Tim Teknis.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya yaitu, pelaksana dan pihak terkait harus dengan cermat memperhatikan kondisi lapangan dan perencanaan manajemen waktu yang tepat.

Pembangunan UPI Bernilai Tambah ini telah diselesaikan di triwulan IV, termasuk di dalamnya instalasi mesin HPI. Telah dilakukan beberapa kegiatan pada periode TW 4 Tahun 2024 untuk mencapai indikator kinerja tersebut, yaitu :

### **1. Rapat Monitoring Progres Pembangunan UPI NT HPI**

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R SKP Dit. Pengolahan, GMB III, Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh, PT Ciremai Putra Tekindo, konsultan pengawas pembangunan UPI NT HPI, PJ dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah untuk monitoring progres Pembangunan UPI NT HPI.
- Pihak konsultan pengawas dan penyedia menyampaikan laporan sebagai berikut :
  - a) Progress pekerjaan pada saat monev adalah kumulatif realisasi mingguan 17,245 %. Dengan deviasi +1,253 %
  - b) Pekerjaan rangka baja (kolom dan rafter) pada gedung A sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan pemasangan Gording C.
  - c) Bahan Atap telah terkirim di lokasi dan dijadwalkan dipasang pada minggu 5
  - d) Simultan dengan pemasangan atap dan setting pemipaan bawah lantai pada gedung A, akan dilakukan pengecoran lantai pada gedung B, C, D
  - e) Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow 100/100 pada gedung B, C, D akan dilaksanakan setelah pekerjaan cor beton lantai mencapai kondisi firm.

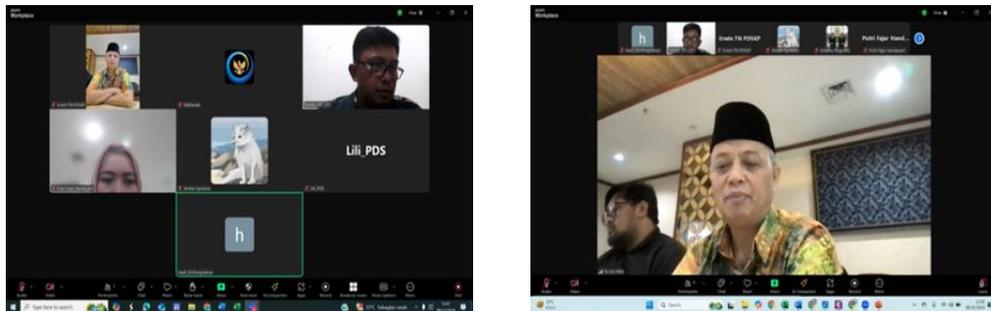


Gambar 22. Rapat Monitoring Progres Pembangunan UPI NT HPI

## **2. Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen terkait Uji Substansi Pelaksanaan PBJ Tahun 2024 pada Paket Pembangunan Konstruksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah di Kota Pekalongan.**

- Rapat dilaksanakan pada 8 November 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. Branding Ditjen PDSPKP, GMB III Lt. 15. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh Auditor dari Inspektorat IV - Itjen KKP, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa, PJ lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, PT Ciremai Putra Tekindo serta perwakilan Timja lingkup Dit. Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen terkait Uji Substansi Pelaksanaan PBJ Tahun 2024 pada Paket Pembangunan Konstruksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah di Kota Pekalongan.
- Dalam pembahasan tersebut, Itjen KKP memberikan rekomendasi ke Direktur Pengolahan agar :
  - a) Menginstruksikan PT Ciremai Putra Tekindo selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Konstruksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah di Kota Pekalongan untuk mempercepat penyelesaian 11 titik pondasi footplate agar dapat mengejar progres realisasi pekerjaan, dan menyediakan APAR di lokasi pekerjaan dalam rangka terjaminnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - b) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada item pekerjaan Pemasangan Pagar Sementara dan Alokasi Biaya Petugas K3 senilai total

Rp7.781.454,19 dalam akhir pembayaran atau melalui Change Contract Order (CCO) untuk item pekerjaan lain yang dibutuhkan.



Gambar 23. Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen terkait Uji Substansi Pelaksanaan PBJ

### 3. Rapat Monitoring Progres Pengadaan Mesin UPI Bernilai Tambah HPI

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13 dan aplikasi Zoom. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh: Penyedia Mesin HPI, Pelaksana Konstruksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, PJ dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan pelaksanaan rapat tersebut adalah monitoring progres Pengadaan Mesin UPI NT HPI.
- Terkait dengan produk HPI dan mesin UPI NT, PT. Berikan yang diwakili oleh Bapak Iwa menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
  - a) Untuk alur proses UPI HPI sudah disiapkan agar bisa memperoleh SKP karena sudah dirancang dengan standar HACPP
  - b) Karena HPI ini rencananya adlah untuk konsumsi manusia (Food Grade) maka bahan baku ikan yang digunakan adalah ikan layak diproses, bahan baku mengacu pada SNI Ikan Segar.
  - c) Komponen utamayang digunakan untuk produk HPI adalah ; ikan, air, dan enzym.
  - d) Jenis ikan akan mempengaruhi parameter waktu maupun suhu

- Berikut adalah alur proses pembuatan hidrolisat protein ikan mulai dari penerimaan ikan hingga menghasilkan produk akhir. Proses ini melibatkan bahan utama: ikan, air, dan enzim:

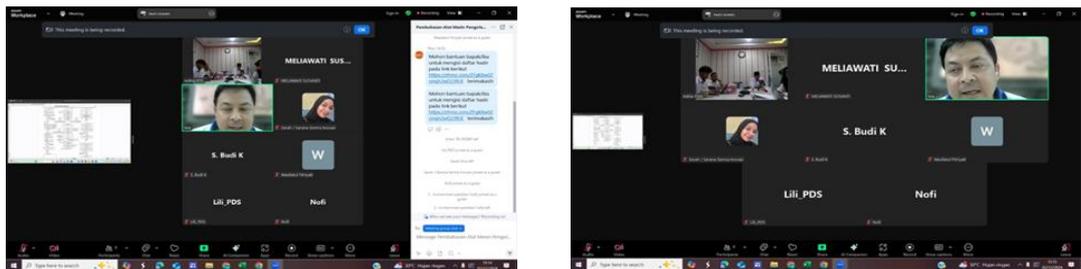
Penerimaan ikan → Pembersihan → Penggilingan.

Pencampuran dengan air dan enzim → Hidrolisis protein.

Inaktivasi enzim → Penyaringan → Pengeringan atau konsentrasi.

Pengemasan → Penyimpanan.

Hasil Akhir: Hidrolisat protein ikan berbentuk cairan kental atau bubuk yang kaya akan peptida dan asam amino, siap digunakan dalam industri makanan, minuman, atau suplemen kesehatan.



Gambar 24. Rapat Monitoring Progres Pengadaan Mesin UPI NT HPI

#### 4. Show Cause Meeting UPI Bernilai Tambah HPI

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III, Lt 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh : Kontraktor Pelaksana (PT. Ciremai Putra Tekindo), Konsultan Pengawas (PT. Bayu Berlian Mandiri), Konsultan Perencana, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Auditor dari Inspektorat 4 Itjen KKP, Biro Umum dan PBJ – Setjen KKP, Setditjen PDSPKP, PJ dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan dilaksankannya rapat tersebut adalah Show Cause Meeting UPI NT HPI
- Kontraktor Pelaksana diberikan target untuk mencapai kumulatif progress

mingguan minimal sesuai target yaitu sebesar 90,576% pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Apabila target tersebut tidak tercapai, PPK Direktorat Pengolahan - Satker Setditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, akan menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I.



Gambar 25. Rapat Show Cause Meeting UPI NT HPI

## 5. Rapat Awal Pembahasan Rencana Change Contract Order (CCO) Kegiatan Pembangunan UPI Bernilai Tambah HPI

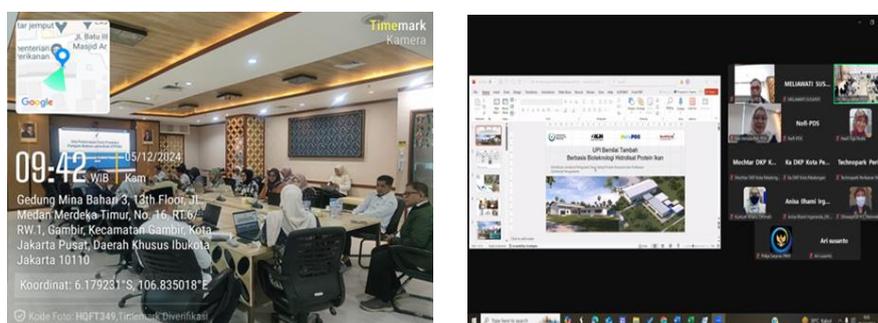
- Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R SKP Dit. Pengolahan, GMB III, Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh : Kontraktor Pelaksana (PT. Ciremai Putra Tekindo), Konsultan Pengawas (PT. Bayu Berlian Mandiri), PT. Berikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Auditor dari Inspektorat 4 Itjen KKP, Biro Umum dan PBJ – Setjen KKP, PJ dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan dilaksankannya rapat tersebut adalah pembahasan rencana *Change Contract Order* (CCO) Kegiatan Pembangunan UPI NT HPI.
- Berdasarkan pencermatan dari Tim Teknis Pusat maupun Auditor, rancangan CCO tersebut masih perlu perbaikan. Diantaranya karena masih ada perhitungan yang kurang tepat maupun perlu konfirmasi ulang terkait besaran nilai ataupun material yang digunakan.

## 6. Rapat Persiapan Operasional UPI Bernilai Tambah HPI dengan BPOM

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. Branding Ditjen PDSPKP, GMB III Lt. 15. Rapat dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan dipimpin oleh Direktur Pengolahan.

Rapat dihadiri antara lain oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan – Badan POM, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan – Badan POM, PT. Sarana Sentra Inovasi (Peralatan dan Mesin Pengolahan HPI), PT. Berikan Teknologi Indonesia, Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta Timja di lingkup Dit. Pengolahan.

- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah sebagai salah satu langkah persiapan operasional UPI khususnya perihal izin edar produk.
- Berikut beberapa pembahasan dalam rapat :
  - a) Ruang proses produksi UPI HPI sudah didesign untuk memenuhi persyaratan GMP SSOP.
  - b) Perlu pemisahan area basah dan area kering, khususnya untuk area produk akhir dan pengemasan.
  - c) BPOM baru bisa melaksanakan pemantauan CPPOB di UPI NT Kota Pekalongan jika UPI NT sudah siap (jadi), dan sudah dilakukan uji coba proses produksi.
  - d) Terkait usulan produk nilai tambah dari UPI NT berupa cookies, mie HPI ataupun *frozen food*, perlu dicermati dengan cermat. BPOM mengingatkan bahwa karakteristik produk “*dry*” ataupun “*wet*” perlu diperhatikan dengan kondisi sarpras produksi yang ada, lini produksi harus berbeda/ dipisahkan. Kriteria / ambang batas mikroba untuk masing – masing jenis produk berbeda.
  - e) Sebaiknya untuk penerbitan izin edar, fokus pada produk HPI dulu.
  - f) Jika belum bisa terbit izin edar, berarti produk belum bisa langsung dijual ke konsumen/eceran.
  - g) Perlu diperhatikan cara penyimpanan untuk *enzym*.



Gambar 26. Rapat Persiapan Operasional UPI Bernilai Tambah HPI

## 7. Uji Coba Mesin Pembuatan HPI

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, bertempat di UPI NT HPI di Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PT. Sarana Sentra Inovasi (Penyedia Mesin), PT. Ciremai Putra Tekindo (konstruksi), PT. Berikan Teknologi Indonesia, Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta Tenaga Ahli/Tim Teknis HPI Dit. Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk melakukan uji coba mesin pembuatan HPI.
- Berikut beberapa pembahasan dalam kegiatan tersebut, yaitu:
  - a) Semua mesin telah berjalan, meskipun ada beberapa hal perlu yang perlu diantisipasi.
  - b) Uji coba ulang terkait proses produksi HPI agar menghasilkan HPI yang sesuai spesifikasi



Gambar 27. Uji Coba Mesin Pembuatan HPI

## Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

### IK 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan	2024	38.159	38.159	100,00		38.159	
	2023	27.560	27.664	100,38			
	2022	19.246	23.226	120,68			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Capaian indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan adalah 38.159 orang, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 38.159 orang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 27.664 orang atau setara 100,38% dari target 27.560 orang, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 37,94%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -0,38%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 23.226 orang atau setara 120,68% dari target 19.246 orang, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 19,11%, sedangkan capainnya mengalami pertumbuhan sebesar -16,82%. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Tenaga Kerja yang teribat bidang Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan, yaitu, capaian tenaga kerja pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terlibat dalam kegiatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP), kegiatan *chest freezer*, dan pabrik es *portable*.

## Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan

### IK 7. Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu proxy untuk melihat daya tukar produk olahan terhadap komoditas biaya produksi dan rumah tangga secara cepat dan near real time, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Peningkatan Nilai Tukar Pengolahan dilihat dari selisih NTPHP tahun ke-t dengan tahun ke-(t-1).

NTPHP > 100, berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya. NTPHP = 100, berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya. NTPHP < 100, berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP	2024	0,25	0,26	104,00		104,94	
	2023	0,25	0,66	264,00			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP adalah 38.159 orang, atau setara dengan 104,00% dari target tahun 2024 sebesar 0,25%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 0,66% atau setara 264,00% dari target

0,25%, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -60,61%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -60,61%. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%) sebesar Rp 170.000.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 169.609.300,- atau sebesar 99,77% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 390.700,- atau setara 0,23%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV ini, adalah:

- a. Diagram timbang NTPHP yang tersedia merupakan Diagram Timbang tahun 2015.
- b. Terbatasnya jumlah lokasi sampling.
- c. Terdapat data hasil monitoring harga di beberapa daerah yang kurang relevan dengan kondisi riil.

Faktor yang menjadi keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV, adalah :

- a. Komitmen Tim Enumetor Daerah dalam melakukan monitoring dan menyampaikan data Harga Produsen dan Harga Konsumen tepat waktu.
- b. Komitmen Tim NTPHP pusat dalam melakukan validasi, pengolahan data dan analisis NTPHP.

Rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, adalah:

- a. Pemutakhiran data diagram timbang NTPHP;
- b. Perlu dilakukan penambahan lokasi sampling Monitoring data harga produsen dan harga konsumen.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%), yaitu:

#### **1. Validasi data dan penghitungan nilai pengolahan hasil perikanan (NTPHP)**

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Desember 2024, bertempat di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari BRIN, BBRSEKP KKP, Pusdatin KKP, Setditjen PDSPKP, dan Direktorat Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah melakukan validasi dan

penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

- Berikut beberapa pembahasan dalam kegiatan tersebut, yaitu:
  - a) Salah satu sasaran program pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2020-2024 adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pengolah hasil perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran program tersebut adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.
  - b) NTPHP berfokus pada rasio antara Indeks Harga yang Diterima (IT) dengan Indeks Harga yang Dibayar (IB) oleh pengolah hasil perikanan. Secara konsep, jika nilai Indeks yang Diterima (IT) lebih besar dari Indeks yang Dibayarkan (IB) maka nilai NTPHP  $>100$ , dan akan berlaku sebaliknya. 4. Keterwakilan NTPHP adalah Rumah Tangga Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil untuk 6 (enam) kelompok jenis pengolahan yaitu penggaraman/pengeringan, pemanggangan/pengasapan, fermentasi, pelumatan daging ikan, pemindangan, pengolahan lainnya dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh 40 kabupaten/kota pada 5 (lima) provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan). Keterwakilan lokasi sampel tersebut sesuai dengan data Diagram Timbang (DT) yang disusun oleh BPS pada tahun 2015.
  - c) Berdasarkan hasil validasi NTPHP tahun 2024 sebesar 104,94 dengan indeks yang diterima (IT) 162,43 dan indeks yang dibayarkan (IB) 154,79.
  - d) Indeks yang Diterima (IT) lebih besar dibandingkan dengan Indeks yang Dibayarkan (IB), hal ini mendeskripsikan bahwa kenaikan harga jual produk olahan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga bahan produksi dan barang konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan tahun dasar.
  - e) Indeks NTPHP tahun 2024 menunjukkan tren positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan indeks NTPHP di sebagian besar bulan pada tahun 2024 dapat menjadi indikasi perbaikan dalam daya beli pengolah hasil perikanan atau peningkatan efisiensi produksi serta distribusi.



Gambar 28. Validasi data dan penghitungan nilai pengolahan hasil perikanan (NTPHP)

## Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan

### IK 8. Pabrik Es *Portable* yang Dibangun (Unit)

Pabrik Es *Portable* yang dibangun adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es *portable* yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 11 Unit Pabrik Es *portable* yang dibangun dalam mendukung Program Kampung Nelayan Modern. Pabrik Es *Portable* yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi factor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Pabrik Es *Portable* yang dibangun (unit)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Pabrik es <i>portable</i> yang disediakan (Unit)	2024	10,00	10,00	100,00		10	
	2023						
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Pabrik Es *Portable* adalah 10 unit, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 10 unit. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es *Portable* yang dibangun (unit) sebesar Rp 20.161.750.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 20.134.371.428,- atau sebesar 99,86% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 27.378.572,- atau setara 0,14%.

Pada triwulan IV 2024, pengadaan pabrik es portabel sebanyak 10 unit telah diselesaikan 100%. Lokasi pabrik es *portable* adalah di Kab. Situbondo, Kab. Belitung, Kota Baubau, Kab. Trenggalek, Kab. Aceh Jaya, Kab. Lampung Selatan, Kab. Gunungkidul, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, dan Kota Gorontalo. Berikut lokasi dan kelompok penerima pabrik es *portable* dimaksud:

Tabel 11. Tabel Penerima Pabrik Es *Portable*

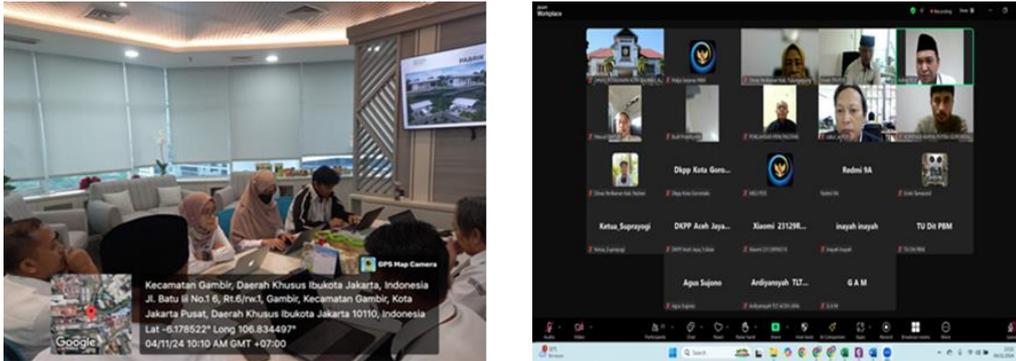
No	Kabupaten/Kota	Penerima
1	Situbondo	Kelompok Masyarakat Ababil
2	Belitung	Koperasi Produsen Kampung Nelayan Maju Desa Suak Gual
3	Kota Bau Bau	Kelompok Pengolah dan Pemasar Benteng Laut
4	Trenggalek	Kelompok Sinar Laut
5	Aceh Jaya	Kelompok Buah Lhok Timon
6	Lampung Selatan	Kelompok Pembudidaya Ikan Anugrah Tani Tambak
7	Gunung Kidul	Koperasi Panjolo Karyo Mukti
8	Pacitan	Kelompok Pengolah dan Pemasaran Peni
9	Gorontalo	Koperasi Konsumen Karya Putra Gorontalo
10	Tulungagung	Koperasi Keluarga Nelayan Semilir

Secara umum faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah kondisi cuaca di lokasi pelaksanaan kegiatan, kendala pengiriman akibat faktor cuaca dan tidak sesuainya jadwal pemasangan aliran listrik / air. Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah koordinasi dan dukungan dari Pemda/Pemkot melalui Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, dan Tim Teknis Pusat maupun daerah. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu sosialisasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan calon lokasi penerima BP pabrik es portabel dan calon kelompoknya serta koordinasi awal dengan pihak PLN ataupun PDAM.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pabrik Es *Portable* Yang Dibangun (unit), yaitu:

## **2. Rapat Koordinasi Pengadaan Pabrik Es Portable Tahun 2024**

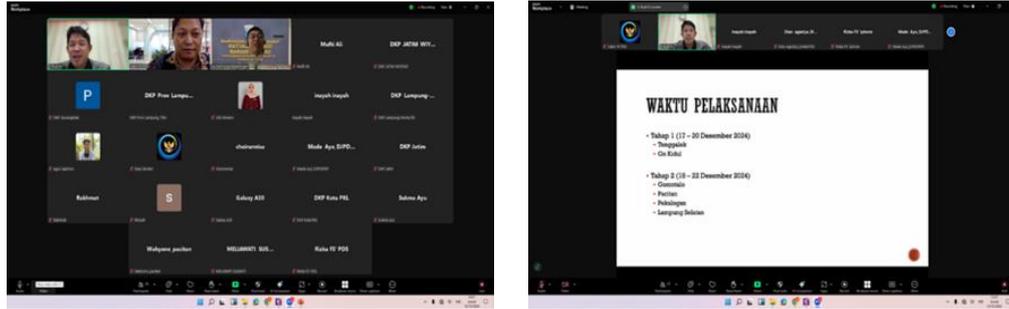
- Rapat dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh Auditor dari Inspektorat IV - Itjen KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan serta kelompok penerima BP Pabrik es portable di 10 Kab/kota (Aceh Jaya, Belitung, Lampung Selatan, Gunung Kidul, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Bau Bau, Gorontalo), Setditjen PDSPKP, PJ lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, serta perwakilan Timja lingkup Dit. Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah monitoring, percepatan dan optimalisasi pengadaan Bantuan Pemerintah Sarana Sistem Rantai Dingin Pabrik Es *Portable*.
- Berikut beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Koordinasi intensif dengan tim teknis daerah, calon penerima dan penyedia barang untuk percepatan penyiapan pondasi, sambungan listrik PLN 3 phase, penyediaan air bersih, fabrikasi PEP.
  - b. Monitoring setiap hari progres pengadaan PEP melalui WA Grup dan telepon.
  - c. Rapat Progres Mingguan untuk memitigasi permasalahan serta peserta pembuat rencana akselerasi pencapaian target output.



Gambar 29. Rapat Koordinasi Pengadaan Pabrik Es Portable

### 3. Rapat Koordinasi Awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Rantai Dingin

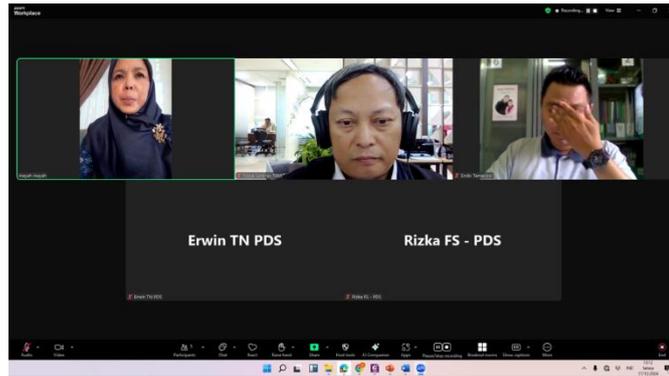
- Rapat dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III, Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Katimja serta dihadiri antara lain oleh: perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (Lampung Selatan, Pekalongan, Gunung Kidul, Pacitan, Trenggalek, Gorontalo), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dit. Pengolahan, Timja di Lingkup Dit. Pengolahan, dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah koordinasi awal rencana pelaksanaan kegiatan rencana pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Sistem Rantai Dingin (SRD) Mendukung Ketahanan Pangan, Sosialisasi SRD Untuk Menjamin Kualitas Produk Perikanan.
- Berikut beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Dit. Pengolahan akan segera mengirim surat untuk pemberitahuan dan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota lokasi rencana pelaksanaan kegiatan.
  - b. Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait, seperti sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).



Gambar 30. Rapat Koordinasi Awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Rantai Dingin

#### 4. Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pabrik Es Portabel di Kab. Lampung Selatan

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin PJ Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan dan dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lampung Selatan, PT. Tamacool Sukses Perkasa (penyedia), Kelompok Pembudidaya Ikan Anugrah Tani Tambak serta perwakilan dari Timja lingkup Dit. Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah monitoring pelaksanaan kegiatan Pabrik Es *Portable* di Kab. Lampung Selatan.
- Berikut beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lampung Selatan akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk monitoring progress pekerjaan, dan koordinasi dengan PLN untuk mengawal penyambungan listrik di lokasi.
  - b. Pihak pelaksana akan melakukan upaya – upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
  - c. Dit. Pengolahan akan melakukan monitoring harian terkait progress pelaksanaan pekerjaan pabrik es di Kab. Lampung Selatan.



Gambar 31. Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pabrik Es Portabel di Kab. Lampung Selatan

Berikut beberapa dokumentasi Pabrik Es Portable di 10 lokasi.





Gambar 32. Pabrik Es Portable di 10 lokasi

## Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan / Sarana Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

### IK 9. Chest Freezer yang Disediakan (Unit)

Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest freezer*) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK. Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (*chest*

freezer) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Pada tahun 2024, target tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan sebanyak 311 unit chest freezer yang tersalurkan.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Chest Freezer yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Chest Freezer Yang Disediakan	2024	311,00	311,00	100,00		311	
	2023	300,00	305,00	101,67			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Chest Freezer yang Disediakan adalah 311 unit, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 311 unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 305 unit atau setara 101,67% dari target 300 unit, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,97%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -1,64%. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Portable yang dibangun (unit) sebesar Rp 2.890.100.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 2.888.548.927,- atau sebesar 99,95% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.551.073,- atau setara 0,05%.

Pada triwulan IV 2024, untuk kegiatan chest freezer ini sudah dilakukan kontrak dan pengiriman untuk 311 unit. Hal ini sesuai dengan kontrak antara Dit. Pengolahan dengan PT.Arafah Fitra Karya nomor : 210/DJPDSPKP.0/PL.420/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan waktu pelaksanaan dari 19 Maret 2024 s/d 30 September 2024. Chest freezer telah dikirim ke 23 propinsi, 92 kabupaten/kota dan 269 kelompok. Berikut adalah penerima bantuan CF Tahun 2024 berdasarkan lokasi penerimanya (Propinsi dan Kabupaten).

Tabel 13. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

No.	Propinsi	Chest Freezer (Unit)
1	Aceh	9
2	Bali	8
3	Banten	14
4	Jambi	4
5	Jawa Barat	49
6	Jawa Tengah	41
7	Jawa Timur	38
8	Kalimantan Barat	24
9	Kalimantan Tengah	4
10	Kalimantan Timur	4
11	Kalimantan Utara	6
12	Kepulauan Riau	2
13	Lampung	14
14	Maluku	10
15	Maluku Utara	4
16	Nusa Tenggara Barat	10
17	Nusa Tenggara Timur	20
18	Papua Selatan	7
19	Sulawesi Barat	4
20	Sulawesi Selatan	22
21	Sumatera Barat	9
22	Sumatera Selatan	4
23	Sumatera Utara	4
<b>Grand Total</b>		<b>311</b>

Faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah, koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait.

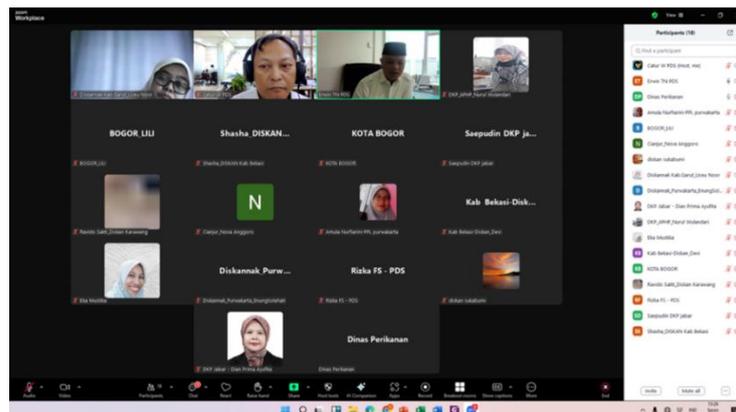
Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja *Chest Freezer* yang disediakan (unit), yaitu:

#### **1. Rapat Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer***

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas KP Kab/Kota wilayah Jawa

Barat penerima BP Dit. Pengolahan TA. 2024 (Kota Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Pangandaran, Kab. Garut, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Subang, Kab. Ciamis, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta), PJ lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, serta Pelaksana Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.

- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah dalam rangka koordinasi untuk monitoring pemanfaatan BP CF.
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Semua BP CF di Jawa Barat termanfaatkan dan operasional
  - b. Dit. Pengolahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, serta semua Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota lokasi penerima BP CF akan melakukan monitoring dan pembinaan kepada kelompok penerima BP CF.



Gambar 33. Rapat Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

Berikut beberapa dokumentasi serah terima *Chest Freezer* kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.





Gambar 34. Serah terima Chest Freezer kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

## **IK 10. Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit)**

Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan value added)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reviu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Peralatan pengolahan ikan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan	2024	165,00	165,00	100,00		165	
	2023	315,00	316,00	100,32			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan adalah 165 unit, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 165 unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 316 unit atau setara 100,32% dari target 315 unit, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 47,78%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar -0,32%. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) sebesar Rp 5.065.825.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 5.064.579.500,- atau sebesar 99,98% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.245.500,- atau setara 0,02%.

Pada triwulan IV 2024, untuk kegiatan peralatan pengolahan ini sudah dilakukan kontrak dan pengiriman untuk 165 unit. Hal ini sesuai dengan kontrak antara Dit. Pengolahan dengan PT. Shahnaz Karya Mandiri nomor : 42/DJPDSPKP.0/PL.420/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan waktu pelaksanaan dari 5 Agustus 2024 s.d. 2 Desember 2024. Peralatan pengolahan telah dikirim ke 22 propinsi, 74 kabupaten/kota dan 163 kelompok. Berikut adalah penerima bantuan PP Tahun 2024 berdasarkan lokasi penerimanya (Propinsi dan Kabupaten).

Tabel 15. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

No.	Provinsi	PP (paket)
1	Aceh	7
2	Bali	3
3	Banten	3
4	Gorontalo	1
5	Jambi	3
6	Jawa Barat	27
7	Jawa Tengah	20
8	Jawa Timur	21
9	Kalimantan Barat	11
10	Kalimantan Tengah	3
11	Kalimantan Timur	3
12	Lampung	13
13	Maluku	6
14	Maluku Utara	3
15	Nusa Tenggara Barat	6
16	Nusa Tenggara Timur	7
17	Papua Selatan	3
18	Sulawesi Barat	3
19	Sulawesi Selatan	15
20	Sumatera Barat	2
21	Sumatera Selatan	3
22	Sumatera Utara	2
<b>Grand Total</b>		<b>165</b>

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah, karena terlambatnya beberapa usulan yang diajukan oleh mitra KKP, sehingga menyebabkan terlambatnya identifikasi dan verifikasi ke kelompok penerima. Kompleksitas jenis peralatan pengolahan yang harus disediakan memerlukan waktu yang cukup buat penyedia

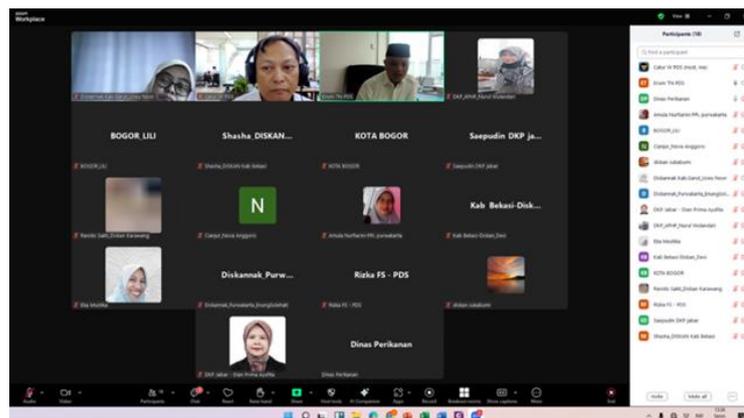
Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah, koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya yaitu, Pengajuan proposal kelompok dapat ditepati sesuai jadwal yang sudah disepakati dan melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit), yaitu:

## 1. Rapat Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP, Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas KP Kab/Kota wilayah Jawa Barat penerima BP Dit. Pengolahan TA. 2024 (Kota Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Pangandaran, Kab. Garut, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Subang, Kab. Ciamis, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta), PJ lingkup Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, serta Pelaksana Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah dalam rangka koordinasi untuk monitoring pemanfaatan BP PP .
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Semua BP PP di Jawa Barat termanfaatkan dan operasional
  - b. Dit. Pengolahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, serta semua Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota lokasi penerima BP PP akan melakukan monitoring dan pembinaan kepada kelompok penerima BP PP.



Gambar 35. Rapat Koordinasi Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan

Berikut beberapa dokumentasi serah terima Peralatan Pengolahan kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.



Gambar 36. serah terima Peralatan Pengolahan kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

## IK 11. Pengadaan Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit)

Indikator Kegiatan Sarana Pasca Panen yang Disediakan (unit) merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan portable yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Sarana Pasca Panen yang Disediakan	2024	9,00	9,00	100,00		9	
	2023	9,00	9,00	100,00			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen yang Disediakan adalah 9 unit, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 9 unit. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 9 unit atau setara 100,00% dari target 9 unit, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, hal tersebut sama dengan pertumbuhan capaian yang tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan yang disediakan (unit) sebesar Rp 7.017.802.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 7.011.447.140,- atau sebesar 99,91% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 6.354.860,- atau setara 0,09%.

Pada triwulan IV 2024, untuk kegiatan sarana pasca panen Reguler sebanyak 9 paket sudah selesai diadakan (fisik 100 %). Lokasi BP SPP Reguler yaitu di : Lampulo (Kota Banda Aceh), Kab. Lampung Selatan, Kota Serang, Kab. Ciamis, dan Kab. Banyumas Kab. Jepara, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Tenggara, dan Kab. Rote Ndao. Selanjutnya dilakukan proses BAST dari KKP ke kelompok. Berikut adalah rincian lokasi dan jenis SPP Reguler :

Tabel 17. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen

No	Kab/Kota	Produk SPP	Dukungan untuk Program	Penerima
1	Banda Aceh (Lampulo)	Pengolahan Tepung Ikan	Mendukung DJPT untuk pengelolaan pemanfaatan perikanan tangkap	Koperasi Konsumen Syariah Sabena PPS Kutarja
2	Lampung Selatan	Penanganan dan pengolahan ikan nila siap masak	Mendukung DJPB pada Kampung Perikanan Budidaya	Koperasi Produsen Perikanan Minas Palas Sejahtera
3	Serang	Penanganan dan pengolahan Ikan Lele siap masak	Mendukung DJPB pada Kampung Perikanan Budidaya	Pokdakan Akramul Farm
4	Ciamis	Penanganan dan pengolahan ikan nila siap masak	Mendukung BPSDMKP pada <i>Smart Fisheries Village</i>	Pokhlasar Bojongsari
5	Banyumas	Penanganan dan pengolahan ikan nila siap masak	Mendukung BPSDMKP pada <i>Smart Fisheries Village</i>	Kelompok Pembudidaya Ikan
6	Maluku Tenggara	Penanganan dan pengolahan Rumput Laut Kering	Mendukung DJPB pada Modelling Rumput Laut	Koperasi Tani Nelayan Elomel
7	Rote Ndao	Penanganan dan pengolahan Rumput Laut Kering	Mendukung DJPB pada Modelling Rumput Laut	Nusa Tenggara Vokasi
8	Jejara	Penanganan dan pengolahan Rajungan kupas	Mendukung kegiatan kerjasama KKP dengan <i>Sustainable Fisheries Partnership</i>	Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara
9	Seram Bagian Barat	Pengolahan Loin Tuna	Mendukung Tahun Tuna	Pokhlasar Samudera Tuna

Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah karena untuk beberapa BP SPP memiliki karakteristik khusus yang perlu pencermatan lebih di lapangan, sehingga dalam proses pekerjaan perlu ada strategi khusus

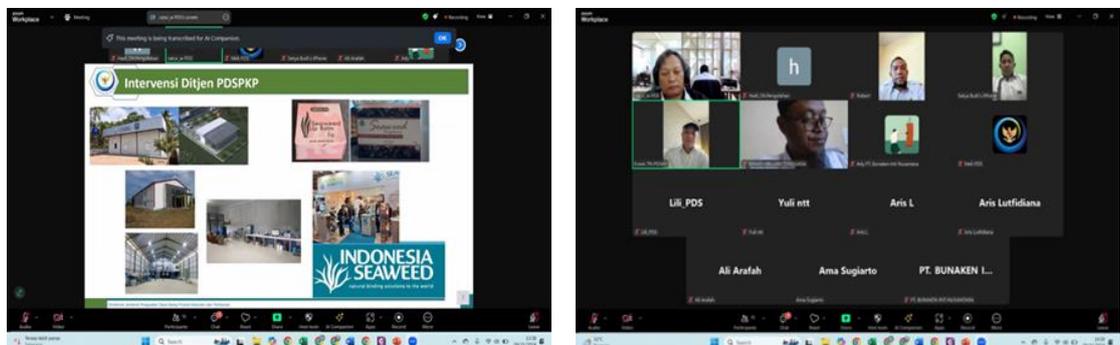
Faktor Keberhasilan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya adalah, pihak Dinas ataupun kelompok dapat memberikan info yang lebih detil terkait kondisi lokasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan (unit), yaitu:

### 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Rumput

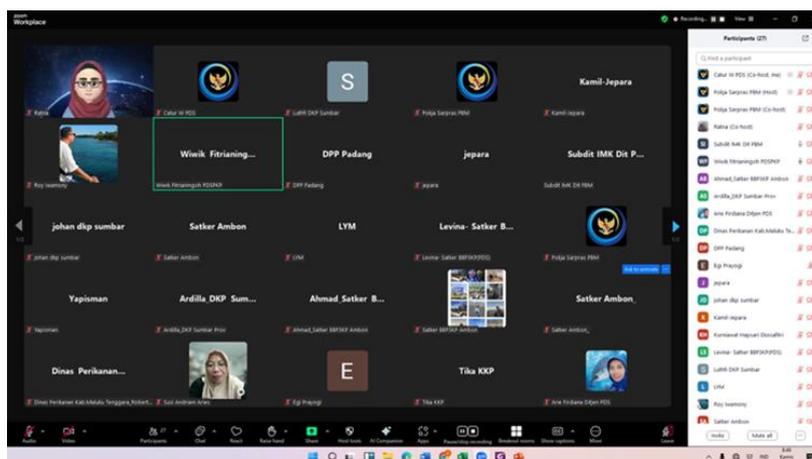
- Rapat dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan serta dihadiri antara lain oleh Auditor dari Inspektorat IV - Itjen KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Maluku Tenggara, Kelompok penerima BP SPP RL, Penyedia barang BP SPP Rumput Laut, PJ lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan, serta perwakilan Timja lingkup Dit. Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan di lapang.
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Koordinasi intensif dengan tim teknis daerah, calon penerima dan penyedia barang untuk percepatan penyiapan pondasi, perataan lahan dan pabrikasi SPP Rumput Laut
  - b. Monitoring setiap hari progres pengadaan SPP Rumput Laut melalui WA Grup.
  - c. Rapat Progres Mingguan Pengadaan SPP Rumput Laut



Gambar 37. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Rumput

## 2. Rapat Koordinasi Pemenuhan SKP di Sarana Pasca Panen

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Katimja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil, serta dihadiri antara lain oleh perwakilan dari, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi (Jawa Tengah dan Maluku), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupate/Kota (Jepara, Maluku Tenggara, Rote Ndao), Satker BBP3KP Ambon, dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah dalam rangka koordinasi untuk pemenuhan SKP di SPP (Reguler).
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Semua lokasi BP SPP Reguler telah berproses untuk penerbitan SKP.
  - b. Untuk SPP yang dalam proses penyelesaian pekerjaan (Seram Bagian Barat, Rote Ndao, Jeepara, dan Maluku Tenggara), Dit. Pengolahan akan mengawal proses penerbitan SKP.
  - c. Untuk SPP Banyumas dan Lampulo, Dit. Pengolahan akan koordinasi dengan Badan Mutu maupun Dinas Kelautan dan Perikanan daerah untuk segera melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan SKP.



Gambar 38. Rapat Koordinasi Pemenuhan SKP di Sarana Pasca Panen

Berikut beberapa dokumentasi serah terima Sarana Pasca Panen kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten/Kota.



Gambar 39. serah terima Sarana Pasca Panen kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

## IK 12. Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang Disediakan (Unit)

Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan merupakan jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pascapanen sehingga mutu tetap terjaga dan selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan di lokasi Kampung Perikanan Budidaya (MP Korporasi). Adapun paket Sarana Pascapanen yang disediakan antara lain : Sarana Pascapanen Ikan Air Tawar dan Rumput Laut. Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reuiu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang disediakan (unit)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan	2024	8,00	8,00	100,00		8	
	2023						
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang Disediakan adalah 8 unit, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 8 unit. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan sebesar Rp1.500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 1.497.457.490,- atau sebesar 99,83 % dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.542.510,- atau setara 0,17%.

Pada triwulan IV 2024, untuk kegiatan sarana pasca panen MP Koorporasi yang disediakan 8 paket SPP sudah selesai diadakan (fisik 100 %). Lokasi BP SPP Korporasi yaitu di : Kab. Situbondo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kab. Lombok Tengah, Kota Padang, Kab.Lampung Timur, dan Kab.Pangkep. Selanjutnya dilakukan proses BAST dari KKP ke kelompok. Berikut adalah rincian lokasi dan jenis SPP Korporasi :

Tabel 19. Tabel Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen (MP Korporasi)

No	Kab/Kota	Produk SPP	Dukungan untuk Program	Penerima
1.	Padang	Penanganan dan pengolahan Ikan Lele siap masak	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Produsen Asosiasi Pengusaha dan Pembudidaya Fisth (APFF)
2.	Tasikmalaya	Penanganan dan pengolahan ikan nila siap masak	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Produsen Amanat Petani Indonesia
3.	Gunung Kidul	Penanganan dan pengolahan Ikan Lele siap masak	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri
4.	Situbondo	Penanganan dan pengolahan Ikan Lele siap masak	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Serba Usaha Central Lele
5.	Lombok Tengah	Penanganan dan pengolahan Ikan Lele siap masak	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Tani Beriuk Sadar
6.	Purwakarta	Penanganan dan pengolahan Ikan Lele siap masak	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Produsen Jaya Barokah Bersama Purwakarta
7.	Lampung Timur	Bandeng Tanpa Duri	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Sinar Laut Indah
8.	Pangkajene Kepulauan	Bandeng Tanpa Duri	Mendukung DJPB pada Korporasi Budidaya	Koperasi Bandeng Sejahtera

Secara umum faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV, relatif tidak ada. Faktor Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah koordinasi dan dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota penerima bantuan, penyuluh, dan tentunya Tim Teknis Pusat maupun daerah. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya yaitu, koordinasi intensif dengan pihak terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja Pengadaan Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) Yang Disediakan (unit), yaitu:

### **1. Rapat Koordinasi Pemenuhan SKP di Sarana Pasca Panen**

- Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Katimja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil, serta dihadiri antara lain oleh perwakilan dari, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, dan pelaksana di lingkup Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan.
- Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut adalah dalam rangka koordinasi untuk pemenuhan SKP di SPP MP Korporasi.
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Semua lokasi BP SPP Korporasi telah berproses untuk penerbitan SKP.
  - b. Untuk SPP Kota Padang, Dit. Pengolahan akan mengawal proses penerbitan SKP.
  - c. Untuk SPP Kab. Tasikmalaya, Kab. Situbondo dan Kab. Pangkep, Dit. Pengolahan akan koordinasi dengan Badan Mutu maupun Dinas Kelautan dan Perikanan daerah untuk segera melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan dalam penerbitan SKP.



Gambar 40. Rapat Koordinasi Pemenuhan SKP di Sarana Pasca Panen

Berikut beberapa dokumentasi serah terima Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.





Gambar 41. serah terima Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) kepada para kelompok melalui Tim Teknis Daerah / Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

### Kegiatan 10. Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

#### **IK 13. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM)**

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebanyak 1.800 UMKM.

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan	2024	1.800	1.800	100,00		1.800	
	2023	1.800	1.800	100,00			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan adalah 1.800 UMKM, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 1.800 UMKM. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 1.800 UMKM atau setara 100,00% dari target 1.800 UMKM, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, hal tersebut sama dengan pertumbuhan capaian yang tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM) sebesar Rp 1.021.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 1.019.176.731,- atau sebesar 99,82 % dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.823.269,- atau setara 0,18%.

Kendala yang dihadapi di triwulan IV dalam capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM) yaitu terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pembinaan maupun pemantauan dan evaluasi secara kontinu.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pada indikator kinerja Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

- a. Pemutakhiran database pembinaan;
- b. Kerjasama dan sinergitas dengan UPI skala mikro kecil, Dinas KP dan pembina mutu propinsi/kabupaten/kota.

Rekomendasi atau tindak lanjut untuk mengatasi kendala adalah dengan melaksanakan pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil secara remote/online.

Kegiatan yang telah dilakukan di triwulan IV dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM), yaitu:

#### **1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bedah UPI dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan Tahun 2024**

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan, GMB III Lt. 13. Rapat dipimpin oleh Katimja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil serta dihadiri Perwakilan Biro Perencanaan KKP, perwakilan Timja lingkup Direktorat PBM, anggota Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil, 100 perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota penerima DAK Fisik kegiatan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, yaitu:
  - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus/DAK Fisik kegiatan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan Triwulan III Tahun 2024
  - b. Update kondisi dan kendala serta solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas penerima DAK Fisik 2024.
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. Koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk tindak lanjut kendala dan permasalahan yang dihadapi Kab/kota.

- b. Melakukan pemantauan secara kontinu progress pelaksanaan kegiatan melalui monitoring remote sesuai pembagian wilayah PIC



Gambar 42. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bedah UPI

## 2. Pembinaan Rencana Kegiatan DAK Bedah UPI Tahun 2025

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19-22 November 2024, bertempat di RR. Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Lt.15. Kegiatan diikuti oleh Tim Pembahas dari Direktorat Pengolahan, Perwakilan Biro Perencanaan, Sesditjen PDSPKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab./Kota yang masuk lokasi prioritas.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk sinkronisasi dan harmonisasi kelengkapan data dukung DAK fisik bidang kelautan dan perikanan TA 2025 khususnya untuk menu Rehabilitasi Sentra Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) dan Bedah UPI Skala Mikro dan Kecil dalam rangka pembinaan.
- Beberapa pembahasan dalam kegiatan tersebut, yaitu:
  - a. Berdasarkan hasil review, sebagian besar Kab./Kota masih belum memenuhi kelengkapan dan atau kesesuaian data sesuai draft juknis tahun 2025.
  - b. Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Perikanan Kab./Kota segera memperbaiki dan melengkapi kekurangan data sesuai yang tercantum pada form pembahasan dan diupload dalam tautan *google drive* <https://bit.ly/DATADUKUNGDAK2025KABKOTA>.



Gambar 43. Pembinaan Rencana Kegiatan DAK Bedah UPI Tahun 2025

### 3. Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
  - a. Propinsi Maluku Utara pada tanggal 22-25 Oktober 2025
  - b. Kabupaten Indramayu dan Kab. Cirebon pada tanggal 8-10 Oktober 2024
  - c. Kabupaten Berau pada tanggal 4-5 November 2024
  - d. 17 Kabupaten Penerima Bantuan Sarana Pasca Panen pada bulan Oktober-Desember 2024
- Kegiatan dihadiri oleh, pelaku usaha skala usaha mikro dan kecil yang dibina di Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Berau dan 17 Kabupaten penerima bantuan sarana pasca panen.
- Tujuan dilaksankannya kegiatan tersebut adalah kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil yaitu untuk meningkatkan penerapan jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sehingga dapat tersertifikasi kelayakan pengolahan dan produk yang dihasilkan dapat berdaya saing tinggi serta dapat meningkatkan produksi.
- Beberapa pembahasan dalam kegiatan, yaitu:
  - a. Propinsi Maluku Utara

34 UMKM penerima DAK tahun 2022-2024 (19 UMKM dari Ternate, 1 UMKM dari Halmahera Utara, 6 dari Tidore Kepulauan, 3 dari Halmahera Timur, dan 5 dari Halmahera Tengah) dengan 51 produk telah dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengurus Sertifikasi Kelayakan Pengolahan.
  - b. Kabupaten Indramayu dan Kab. Cirebon

Pelaku usaha skala mikro kecil di Indramayu dan Kab. Cirebon yang belum memiliki SKP diharapkan untuk dapat menerapkan GMP dengan baik sehingga dapat segera memenuhi legalitas SKP dan meningkatkan daya saing produk.

c. Kabupaten Berau

Hasil pembinaan penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan seluruh pelaku usaha telah memahami penerapan GMP dan pengurusan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan serta 1 UKM telah berhasil mendaftarkan SKP dan telah memenuhi persyaratan yang selanjutnya dinas akan melakukan pembinaan/verifikasi.

d. Kabupaten Bagi Penerima Bantuan Sarana Pasca Panen

Hasil pembinaan penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terhadap 17 pelaku usaha penerima bantuan sarana pasca panen, semuanya telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan.



Gambar 44. Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

#### 4. Pembinaan Pengurusan Izin Edar MD, Halal dan Merek

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan dihadiri oleh 16 UKM dari 12 Kab./Kota yang lolos program kurasi Ditjen PDSPKP, Dit. Pemasaran, BPP3KP, penyuluh perikanan dan pembina mutu dinas kab/kota.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai tindak lanjut program UMKM Naik Kelas yang diusulkan untuk mendapatkan izin edar MD, halal dan merek sebagai tindak lanjut program UMKM Naik Kelas.
- Beberapa pembahasan dalam kegiatan, yaitu:
  - a. Penyiapan dokumen CPPOB, sertifikasi halal dan Merek didampingi oleh penyuluh, dinas perikanan Kab./kota.
  - b. Khusus Penyiapan dokumen CPPOB, UPI ditargetkan diselesaikan dalam waktu 1 bulan.
  - c. Sebagai Tindak Lanjut jika dokumen sudah siap akan dilakukan pembinaan selanjutnya cara pengajuan ke sistem dan prosedur lainnya dalam rangka mendapatkan izin penerapan CPPOB.



Gambar 45. Pembinaan Pengurusan Izin Edar MD, Halal dan Merek

#### 5. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
  - a. Kegiatan Klinik Mutu pada kegiatan bazar bulanan produk kelautan dan perikanan dilaksanakan pada setiap bulan (Oktober, November dan Desember), bertempat di parkir GMB 3, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - b. Kegiatan Sosialisasi Protein Ikan di Kota Solo tanggal 14 Oktober 2024.

- Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kalangan masyarakat yang mengikuti bazar/expo
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat baik secara online (Instagram) maupun offline.
- Kegiatan klinik mutu memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 46. Klinik Mutu Kelautan dan Perikanan

#### **IK 14. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM)**

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan Unit Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2024, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang

Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebanyak 875 UMKM.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk	2024	875	875	100,00		875	
	2023	875	875	100,00			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk adalah 875 UMKM, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 875 UMKM. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 875 UMKM atau setara 100,00% dari target 875 UMKM, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, hal tersebut sama dengan pertumbuhan capaian yang tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

. Indikator kinerja tersebut adalah indikator kinerja baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) sebesar Rp 7.285.407.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 7.285.353.500,- atau sebesar 100,00% dari pagu anggaran, dengan efisiensi anggaran Rp 53.500,- atau setara

Kendala yang dihadapi di triwulan IV dalam capaian indikator kinerja Unit

Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM) adalah Pelaku usaha/masyarakat perikanan masih banyak yang belum memahami jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pada indikator kinerja kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM), yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Teknologi
- c. Lingkungan kerja
- d. Koordinasi dengan instansi terkait

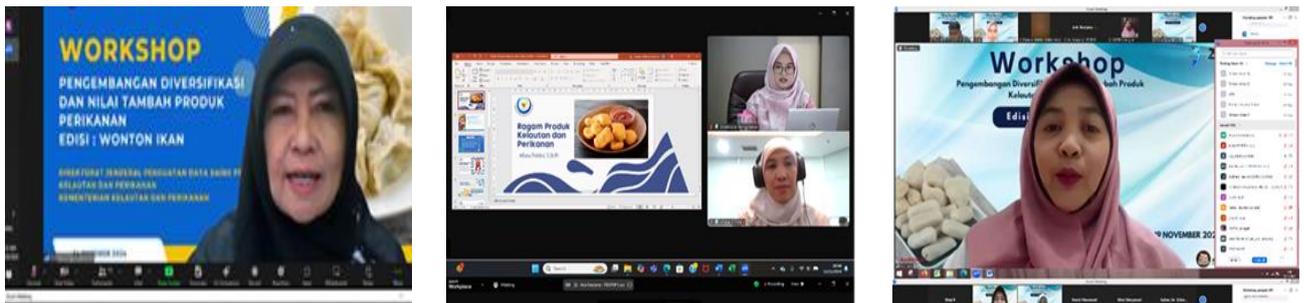
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada kegiatan selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing.

Kegiatan yang telah dilakukan di triwulan IV dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam dan Diversifikasi Produk (UMKM), yaitu:

### **1. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan**

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
  - a. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Wonton Ikan Tuna dilaksanakan pada Selasa, 24 September 2024 secara hibrid yaitu offline di Ruang Worksop BBP3KP dan online melalui Zoom Meeting
  - b. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Stik HPI dilaksanakan pada Jumat, 15 November 2024 secara hibrid yaitu offline di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan online melalui Zoom Meeting
  - c. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi Pempek HPI dilaksanakan pada Selasa, 19 November 2024 secara hibrid yaitu offline di Ruang Workshop BBP3KP dan online melalui Zoom Meeting
- Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, UKM pengolahan perikanan, dan UKM perikanan.

- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan UPI dalam melakukan diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
- Resep wonton ikan tuna, stik HPI, dan pempek HPI yang telah dibagikan ke Dinas dan UKM yang mengikuti dapat dijadikan opsi untuk UKM dapat berinovasi dalam pengembangan produk sehingga memunculkan ragam produk yang baru di masing-masing daerah.



Gambar 47. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan

## 2. Sosialisasi Fortifikasi HPI Pada Produk Olahan Pangan

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di R.R. SKP Dit. Pengolahan GMB 3, Lt. 13. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, UKM pengolahan perikanan, dan UKM perikanan, serta mahasiswa Universitas Diponegoro.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai langkah memberikan informasi bahwa telah dilakukan uji coba pada beberapa produk pangan dengan penambahan HPI demi peningkatan asupan protein hingga mencapai 100 Gr/Kapita/Hari menuju Indonesia emas tahun 2045
- Melalui sosialisasi fortifikasi HPI pada produk pangan diharapkan pelaku usaha mikro dan kecil mengolah kembali, diperbanyak dan disebarakan supaya asupan protein dapat merata sehingga semua kalangan bisa merasakan manfaat dari HPI.



Gambar 48. Sosialisasi Fortifikasi HPI Pada Produk Olahan Pangan

### 3. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
  - a. Kegiatan di Kota Palopo dilaksanakan pada Jumat, 04 Oktober 2024 di Solata Cafe Jln. K.H. Moh Hasyim, Tompotika, Kec. Wara Sel, Kota Palopo, Sulawesi Selatan
  - b. Kegiatan di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan pada Minggu, 27 Oktober 2024 di Hotel Kartika Jln. Jenderal Ahmad Yani No.214, Gampong Jawa, Kec. Langsa, Kota Langsa, Aceh
  - c. Kegiatan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada Sabtu, 21 Desember 2024 di Jln. Pulo Ambon KotaBandar Lampung.
- Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, UKM pengolah perikanan, dan UKM perikanan.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan melalui produk perikanan bermutu, sehat sehat dan memiliki nilai tambah tinggi.
- Kegiatan ini berguna untuk membina kepada pelaku usaha agar menghasilkan produk perikanan yang bermutu, menumbuhkan wirausaha baru di bidang perikanan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha produk perikanan yang dapat dilakukan di skala rumah tangga



Gambar 49. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan

#### 4. Kampanye Protein Ikan Melalui Makan Bergizi Gratis Menu Ikan Dalam Rangka Hari Ikan Nasional

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
  - a. Kota Surakarta, dilaksanakan pada Minggu, 13 Oktober 2024
  - b. SDN Kebon Kosong 02, dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024
  - c. SDN Kebon Kosong 03, dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024
  - d. SDN Kebon Kosong 07, dilaksanakan pada Kamis, 21 November 2024
  - e. Pondok Pesantren Assalafie, Cirebon, dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024
- Peserta yang terlibat pada kegiatan Makan Bergizi Gratis Menu Ikan yaitu :
  - a. Kota Surakarta sebanyak 1.115 anak sekolah dan pendamping
  - b. SDN Kebon Kosong 02 Jakarta Pusat sebanyak 445 anak sekolah dan pendamping
  - c. SDN Kebon Kosong 03 Jakarta Pusat sebanyak 312 anak sekolah dan pendamping
  - d. SDN Kebon Kosong 07 Jakarta Pusat sebanyak 300 anak sekolah dan pendamping

- e. Pondok Pesantren Assalafie, Cirebon sebanyak 1.800 anak sekolah dan pendamping
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut yaitu:
  - a. Mengenalkan dan meningkatkan kebiasaan makan ikan sejak dini.
  - b. Mendorong kesadaran akan pentingnya ikan sebagai salah satu sumber pangan lokal yang kaya manfaat.
  - c. Mendukung program pendidikan gizi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah.
- Melalui kegiatan ini, diharapkan tidak hanya tercipta generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi.



Gambar 50. Kampanye Protein Ikan Melalui Makan Bergizi Gratis Menu Ikan Dalam Rangka Hari Ikan Nasional

## IK 15. Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar yang Dibina (Industri)

Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar yang Dibina (Industri) adalah

jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu.

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang dapat bersaing di pasar regional maupun global maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kinerjanya. Pada tahun 2024, target Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina sebanyak 500 industri.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina	2024	500	500	100,00		540	
	2023	1.070	1.070	100,00			
	2022	300	70	23,33			
	2021			#VALUE!			
	2020			#VALUE!			

Capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah dan Besar yang Dibina adalah 500 Industri, atau setara dengan 108,00% dari target tahun 2024 sebesar 500 Industri. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 1.070 Industri atau setara 100,00% dari target 1.070 Industri, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -53,27%, sedangkan pertumbuhan capaian tidak dapat dibandingkan karena persentase realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 70 Industri atau setara 23,33% dari target 300 Industri, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1.429%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 328,57%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri) sebesar Rp 993.104.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 992.730.460,- atau sebesar 99,96 % dari pagu anggaran, dengan efisiensi

anggaran sebesar Rp 373.540,- atau sebesar 0,04%.

Faktor kendala yang dihadapi dalam pencapaian output pada triwulan IV, yaitu:

- a. Tidak semua pelaku usaha memahami pentingnya pengelolaan lingkungan serta keterkaitannya dengan keberlangsungan usahanya;
- b. Dalam penyusunan policy brief hilirisasi tuna melibatkan tim yang terdiri dari berbagai pihak dan sulit untuk menyelaraskan agenda;
- c. Penyelenggaraan catfish day merupakan hal yang pertama kali dilakukan setelah vakum selama lebih dari 10 tahun sehingga diperlukan usaha yang lebih keras dalam penyelenggaraannya.

Faktor keberhasilan yang telah dilaksanakan agar tercapainya target pada triwulan IV, yaitu:

- a. Kerjasama antar anggota Timja dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Penggunaan teknologi seperti rapat online
- c. Sinergi dengan stakeholder terkait seperti asosiasi

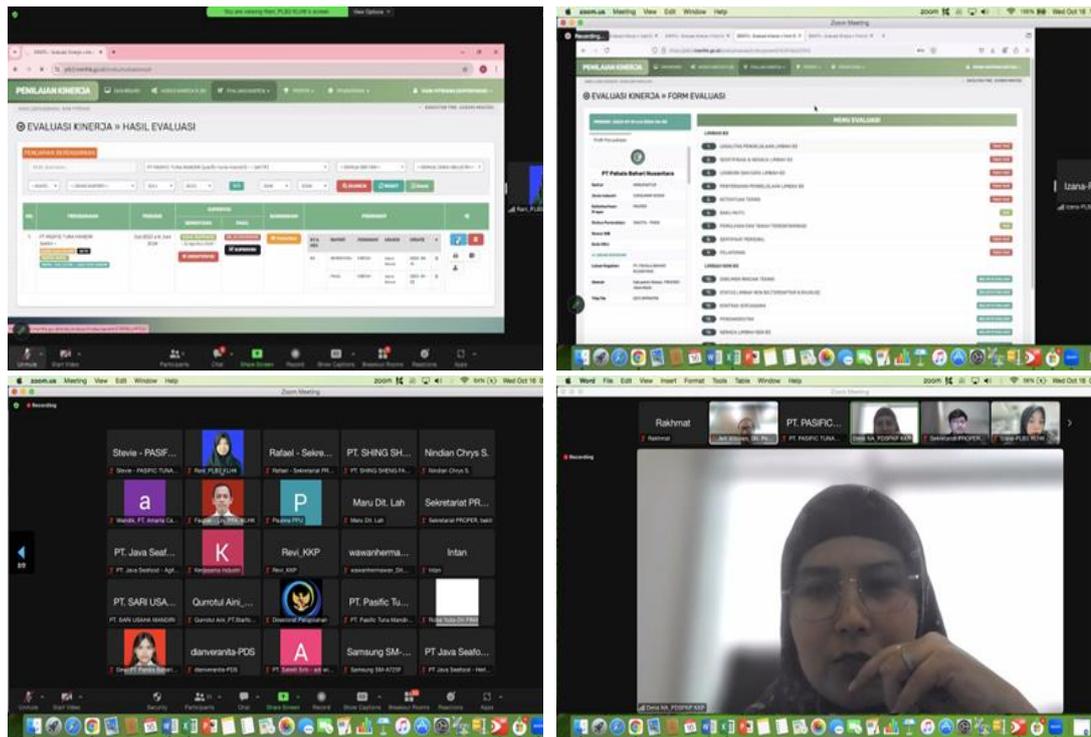
Rekomendasi yang akan dilakukan untuk tercapainya target pada kegiatan berikutnya, yaitu:

- a. Pemanfaatan teknologi untuk efektifitas dan efesiensi kegiatan
- b. meningkatkan sinergi dengan pihak terkait lain baik instansi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan lain sebagainya

Kegiatan yang telah dilakukan di triwulan IV dalam rangka mencapai indikator kinerja Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri), yaitu :

### **1. Asistensi Perbaikan Peringkat PROPER**

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan dihadiri oleh 14 UPI yang memiliki peringkat PROPER merah
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk memfasilitasi UPI yang mendapatkan peringkat PROPER merah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungannya.
- Beberapa pembahasan dalam rapat, yaitu:
  - a. UPI berkomitmen untuk memperbaiki kinerja linkungannya.
  - b. Hasil akhir perbaikan akan diumumkan pada akhir tahun 2024.



Gambar 51. Asistensi Perbaikan Peringkat PROPER

## 2. Seminar *Catfish Day*

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024, bertempat di Aula Dina Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan dihadiri oleh pelaku usaha komoditas catfish dari hulu sampai hilir
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk membahas serta mencari alternatif Solusi dalam hilirisasi komoditas catfish.
- Beberapa pembahasan dalam kegiatan tersebut, yaitu:
  - a. Fluktuasi harga bahan baku antara lain disebabkan oleh belum adanya kemitraan yang baik antara pembudidaya dengan distributor atau pengolah. Sesuai hukum pasar, harga akan turun apabila pasokan lebih tinggi daripada permintaan. Karena itu, perlu ada pengaturan jadwal panen agar dengan mempertimbangkan permintaan. Asosiasi harus berperan aktif untuk menyeimbangkan antara pasokan dengan permintaan ini.
  - b. Produk turunan patin dan lele memiliki potensi yang sangat besar dan pelaku usaha tidak boleh putus asa apabila dalam suatu waktu mengalami kegagalan. Hal ini yang seringkali terjadi yaitu pelaku usaha tidak sabar dalam melakukan usahanya dan kurang memiliki konsistensi.

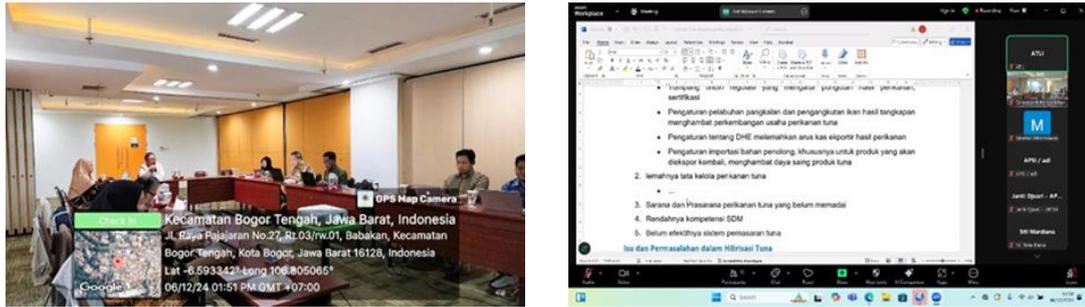
- c. Untuk mengefesienkan biaya produksi, harus dimulai dari sisi hulu. Saat ini menurut perhitungan APCI, HPP untuk pembudidaya patin dan lele berada di kisaran 17.000 – 18.000 per kg.
- d. Pelaku usaha harus dapat melihat kebutuhan konsumen untuk menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi dengan jumlah yang sesuai.



Gambar 52. Seminar *Catfish Day*

### 3. Pembahasan Kajian / *Policy Brief* Hilirisasi Tuna

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 Desember 2024, dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting dan di Hotel Zest, Kota Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Teknis Hilirisasi Tuna yang terdiri dari pelaku usaha, akademis, dan perwakilan pemerintahan.
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk membahas serta mencari alternatif solusi dalam hilirisasi tuna.
- Beberapa pembahasan dalam kegiatan tersebut, yaitu:
  - a. Kelembagaan tim hilirisasi perlu diperkuat agar dapat memberikan dampak yang lebih besar
  - b. Untuk memberikan masukan kepada pimpinan terkait hilirisasi tuna, akan dibuat *policy brief* yang sifatnya singkat, padat, dan langsung mengerucut ke akar permasalahan
  - c. Permasalahan yang dibahas harus holistic hulu hilir karena kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat
  - d. Beberapa regulasi yang membutuhkan revisi harus detail per pasalnya karena tidak semua pasal yang diatur dalam regulasi tersebut menghambat hilirisasi.



Gambar 53. Pembahasan Kajian / *Policy Brief* Hilirisasi Tuna

## **IK 16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan (Nilai)**

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan (Nilai)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2024	75	84,03	112,04	75	100	133
	2023	75	84,03	112,04			
	2022	75	85,47	113,96			
	2021	75	81,73	108,97			
	2020	80	81,35	101,69			

Capaian indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan adalah 84,03, atau setara dengan 112,04% dari target tahun 2024 sebesar 75. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 84,03 atau setara 112,04% dari target 75, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, hal tersebut sama dengan pertumbuhan capaian yang tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 85,47 atau setara 113,96% dari target 75, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,68%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -1,68%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 81,73 atau setara 108,97% dari target 75, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,58%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 4,58%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 81,35 atau setara 101,69% dari target 75, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,47%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 7,16%.

Dikarenakan perubahan organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP bahwa Direktorat Pengolahan tidak lagi melakukan pelayanan publik,

sehingga tidak adanya anggaran dan kegiatan pendukung Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

### IK 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengolahan (Indeks)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2024	87,00	88,10	101,26	87	100	115
	2023	83,2	92,14	110,75			
	2022	83	87,45	105,36			
	2021	73	86,76	118,85			
	2020	72	82,22	114,19			

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan adalah 88,10, atau setara dengan 101,26% dari target tahun 2024 sebesar 87, dan setara dengan 115% dari target RPJMN sebesar 87. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 92,14 atau setara 110,75% dari target 83,2, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,38%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -8,56%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 87,45 atau setara 105,36% dari target 83, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,36%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 5,11%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun

2021 yaitu 86,76 atau setara 118,85% dari target 73, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,80%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -11,35%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 82,22 atau setara 114,19% dari target 72, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,52%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 4,08%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan pada semester II antara lain:

1. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
2. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

Kendala yang dihadapi pada triwulan IV untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu diantaranya:

1. Pegawai masih jarang mengikuti diklat ataupun pelatihan yang bernilai 20JP pada semester II;
2. Pegawai yang masih sering tidak melakukan update diklat/pelatihan yang diikuti pada aplikasi e-pegawai.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya mengingatkan kembali secara rutin kepada pegawai untuk melakukan update data diklat/pelatihan kedalam aplikasi e-pegawai.

#### **IK 18. Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pengolahan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Pengolahan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pengolahan.

Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2024	84,00	84,00	100,00	84	100	119
	2023	80,5	86,30	107,20			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan adalah 84, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 dan target RPJMN sebesar 84. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 86,30 atau setara 107,20% dari target 80,5, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,67%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -6,72%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan IV antara lain:

1. Melakukan penginputan capaian realisasi kegiatan pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
2. Menyiapkan data dukung terkait perencanaan kegiatan serta capaian realisasi kegiatan.

### **IK 19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)**

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Pengolahan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah ditindak lanjuti.

Formulasi :

$$X = (\Sigma a / \Sigma b) \times 100$$

X : Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)

Σa : Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Direktorat Pengolahan Tahun 2023

Σb : Jumlah temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Pengolahan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan	2024	100	100	100,00	84	100	119
	2023	100	100	100,00			
	2022	75	75	100,00			
	2021	75	100	133,33			
	2020						

Capaian indikator kinerja Indeks Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan adalah 100%, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 100%, dan setara dengan 119% dari target RPJMN sebesar 84. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 100% atau setara 100,00% dari target 100%, pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, hal tersebut sama dengan pertumbuhan capaian yang tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 75% atau setara 100,00% dari target 75%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 33,33%, sedangkan capaian pertumbuhan tidak dapat dibandingkan karena persentase realisasi tahun 2023 dan 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 100%, atau setara dengan 133,33% dari target 75%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 25,00%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -25,00%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan IV antara lain:

1. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

#### **IK 20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2024	80	89,47	111,84	80	100	125
	2023	75	100	133,33			
	2022	70	100	142,86			
	2021	65	100	153,85			
	2020	60	100	166,67			

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan adalah 89,47%, atau setara dengan 111,84% dari target tahun 2024 sebesar 80%, dan setara dengan 125% dari target RPJMN sebesar 80. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 100%, atau setara 133,33% dari target 75%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 10,53%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar -16,12%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 100%, atau setara 142,86% dari target 75%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2022 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar -6,67%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 100%, atau setara 153,85% dari target 65%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2021 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan -7,14%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 100%, atau setara 166,67% dari target 60%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2020 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan -7,69%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan IV,

antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## **IK 21. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan	2024	1	1	100,00		100	
	2023	1	1	100,00			
	2022						
	2021	1	1	100,00			
	2020						

Capaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan adalah 1 inovasi, atau setara dengan 100,00% dari target tahun 2024 sebesar 1 inovasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 1 inovasi, atau setara 100,00% dari target 1 inovasi, pertumbuhan realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, hal tersebut sama dengan pertumbuhan capaian yang tidak

dapat dibandingkan. Di tahun 2022 indikator kinerja tersebut tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 1 inovasi, atau setara 100,00% dari target 1 inovasi, pertumbuhan realisasi dan pertumbuhan capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja tersebut tidak ada di tahun 2022. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**IK 22. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar	2024	94	133,33	141,84	94	100	106
	2023	92	133,33	144,92			
	2022	70	100,00	142,86			
	2021	84	97,5	116,07			
	2020	82	100,00	121,95			

Capaian indikator kinerja Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah 133,33%, atau setara dengan 141,84% dari target tahun 2024 sebesar 94%, dan setara dengan 106% dari target RPJMN sebesar 94%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 133,33%, atau setara 144,92% dari target 92%,

pertumbuhan terhadap realisasi tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2023 dan 2024 memiliki jumlah realisasi yang sama, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar -2,13%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 100,00%, atau setara 142,86% dari target 70%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 33,33%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar 1,45%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 97,5%, atau setara 116,07% dari target 84%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,56%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar 23,08%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 100,00%, atau setara 121,95% dari target 82%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,50%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar -4,82%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan III ini adalah saat penginputan dokumentasi harus dilakukan pemotongan atau cropping sesuai dengan aturan, sehingga dokumentasi menjadi terpotong. Adapun faktor keberhasilan adalah telah terpublikasikannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktur Pengolahan.

### **IK 23. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan (%)**

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Pengolahan dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan IV yaitu rutin melakukan penginputan transaksi keuangan di aplikasi SAKTI.

Tabel 30. Ikhtisar Pencapaian Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan	2024	95	99,87	105,13		100	
	2023	95	99,57	104,81			
	2022	90	99,61	110,68			
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan adalah 99,87%, atau setara dengan 105,13% dari target tahun 2024 sebesar 95. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 99,57% atau setara 100,00% dari target 95%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,30%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 0,30%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 99,61% atau setara 110,68% dari target 90%, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,04%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar -5,30%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 59.733.392.857,- atau sebesar 99,87% dari pagu anggaran setelah terjadi AA. Dimana capaian realisasi ini sama dengan realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 47.288.908.544,- atau 99,57% dari pagu anggaran.

Tabel 31. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan per Indikator Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	166.722.000	165.961.400	99,54

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	1.198.191.000	1.197.614.806	99,95
3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/sertifikat <i>Good Manufacturing Product</i> (GMP) (Produk)	1.479.808.000	1.473.858.824	99,60
4	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	161.497.000	160.592.582	99,44
5	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (unit)	10.700.000.000	10.672.090.769	99,74
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (orang)	—	—	—
7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	170.000.000	169.609.300	99,77
8	Pabrik es portable yang dibangun (unit)	20.161.750.000	20.134.371.428	99,86
9	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	2.890.100.000	2.888.548.927	99,95
10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	5.065.825.000	5.064.579.500	99,98
11	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	7.017.802.000	7.011.447.140	99,91
12	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	1.500.000.000	1.497.457.490	99,83
13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.021.000.000	1.019.176.731	99,82

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
14	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	7.285.407.000	7.285.353.500	100,00
15	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	993.104.000	992.730.460	99,96

#### **IK 24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan (%)**

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 32. Ikhtisar Pencapaian Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat (%)

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target RPJMN	Realisasi s.d. 2024	Persentase Realisasi s.d. 2024 terhadap Target RPJMN
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Pengolahan	2024	80	84,07	105,09	80	84,07	105
	2023	77,5	94,76	122,27			
	2022	75	93,25	124,33			
	2021	72,5	87,43	120,59			
	2020	70	83,97	119,96			

Capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Pengolahan adalah 84,07%, atau setara dengan 105,09% dari target tahun 2024 sebesar 80%, dan setara dengan 105% dari target RPJMN sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 94,76%, atau setara 122,27% dari target 77,5%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 11,28%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar -14,05%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 93,25%, atau setara dengan 124,33% dari target 75%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,62%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar -1,66%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 87,43%, atau setara dengan 120,59% dari target 72,5%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,66%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 83,97%, atau setara dengan 119,96% dari target 70%, maka pertumbuhan realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,12%, sedangkan capaian mengalami pertumbuhan sebesar 0,53%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja triwulan IV tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Oktober sampai dengan Desember 2024. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 102,99 (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 103,22. Adanya penurunan 2,26 poin atau 2,15% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, dan jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 2,25 poin atau 2,14%. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan triwulan IV tahun 2024 diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Perhitungan Utilitas UPI (%); target 68%; capaian 68,26% atau 100,38% dari target.
- IKK Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan (Produk); target 12; capaian 15 atau 120,00% dari target.
- IKK Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) (Produk); target 7.502; capaian 7.513 atau 100,15% dari target.
- IKK Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Data); target 3; capaian 3 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun (Unit); target 1; capaian 1 atau 100,00% dari target.
- IKK Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang); target 38.159; capaian 38.159 atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%); target 0,25%; capaian 0,26% atau 104,00% dari target.

- IKK Pabrik Es *Portable* Yang Dibangun (Unit); target 10; capaian 10 atau 100,00% dari target.
- IKK *Chest Freezer* Yang Disediakan (Unit); target 311; capaian 311 atau 100,00% dari target.
- IKK Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (Unit); target 165; capaian 165 atau 100,00% dari target.
- IKK Sarana Pasca Panen yang Disediakan (Unit); target 9; capaian 9 atau 100,00% dari target.
- IKK Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) yang Disediakan (Unit); target 8; capaian 8 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM); target 1.800; capaian 1.800 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM); target 875; capaian 875 atau 100,00% dari target.
- IKK Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Industri); target 80; capaian 80 atau 100,00%.
- IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai); target 75; capaian 84,03 atau 112,04% dari target.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks); target 87; capaian 88,10 atau sebesar 101,26% dari target.
- IKK Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai); target 84; capaian 84 atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan (%); target 100%, capaian 100% atau 100,00% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 80; capaian 89,47 atau sebesar 111,84%.
- IKK Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi); target 1; capaian 1 atau 100,00% dari target.

- IKK Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar; target 94; capaian 133,33% atau 120,00 dari target%.
- IKK Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan (%); target 95; capaian 99,87 atau 105,13% dari target.
- IKK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%); target 80; capaian 84,07 atau 105,09% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan triwulan IV Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung-jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

#### 4.2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan IV, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan yang disediakan	Konsensus <i>Ekstrak ikan gabus (Channa striata) sebagai sumber albumin – Syarat mutu dan pengolahan</i> tidak dapat dilaksanakan bersama dengan 6 RSNI	Melaksanakan jajak pendapat untuk RSNI ekstrak ikan gabus sebagai sumber albumin akan dilaksanakan di bulan Januari 2025

#### 4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut
<p>a. Kendala yang dihadapi pada triwulan III, enumerator belum seluruhnya melakukan pendataan dan penginputan data.</p> <p>b. Raw Data Lalin Ekspor dan Domestik baru diperoleh pada bulan Oktober 2024, sehingga penghitungan VPO tidak dapat dilakukan dengan cepat</p>	<p>a. Melakukan pendataan Utilitas Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar.</p> <p>b. Permohonan Data Lalu Lintas Domestik dan Ekspor TW 3 Tahun 2024, melalui nota dinas dari Direktur Pengolahan ke Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</p>

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM ([https://drive.google.com/drive/folders/1isBSABOxzAPW5xK7485u\\_rgmy9jvNO3c](https://drive.google.com/drive/folders/1isBSABOxzAPW5xK7485u_rgmy9jvNO3c)).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkahit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: [direktoratpbm@gmail.com](mailto:direktoratpbm@gmail.com). Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

#### 4.4. Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**  
Jabatan : Direktur Pengolahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,  
Direktur Pengolahan

Widya Rusyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang dirumuskan	2.	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	12
3.	Terlaksananya sertifikasi produk KP	3.	Produk yang mendapatkan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)/HACCP (Produk)	10.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi publik penguatan daya saing produk KP	4.	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk KP	5.	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	1
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	38.159
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya Sarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	8.	Pabrik es portable yang disediakan (Unit)	10
		9.	Chest freezer yang disediakan (Unit)	311
9.	Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	165
		11.	Pengadaan sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
10.	Tersedianya Sarana Pengolahan MP Korporasi	12.	Pengadaan sarana pasca panen (MP Korporasi) yang disediakan (Unit)	8
11.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
12.	Terlaksananya UPI Skala Menengah Besar yang dibina	15. UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500
13.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan	16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat Pengolahan (Nilai)	75
		17. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan (Indeks)	87
		18. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	84
		19. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pengolahan (%)	100
		20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengolahan (%)	80
		21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan (Inovasi)	1
		22. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan (%)	94
		23. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan (%)	95
		24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan (%)	80

## DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	59.811.206
Total Anggaran Direktorat Pengolahan Tahun 2024		59.811.206

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Pertama,  
Direktur Pengolahan



Widya Rusyanto